

UPAYA

MEMOTRET PRAKTIK SDGS DESA

PENGALAMAN DI 21 DESA DI NUSA TENGGARA BARAT
DAN NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Istilah dan Singkatan	v
Kata Pengantar	vii
I. Pendahuluan	1
II. Upaya Memotret Capaian	5
A. Provinsi Nusa Tenggara Barat	5
1. Desa Batu Tulis	5
2. Desa Nyerot	9
3. Desa Sukarara	12
4. Desa Ubung	15
5. Desa Pringgasela Selatan	17
6. Desa Jurit Baru	21
7. Desa Beriri Jarak	24
8. Desa Pagutan	29
9. Desa Pemepek	32
B. Provinsi Nusa Tenggara Timur	36
1. Desa Ajaobaki	36
2. Desa Biloto	40
3. Desa Kuanek	43
4. Desa Nekbaun	46

5. Desa Niukbaun	50
6. Desa Oelomin	53
7. Desa Tunfeu	57
8. Desa Oe'Ekam	60
9. Desa Oesena	63
10. Desa Oelet	67
11. Desa Maubesi	70
12. Desa Oebelo	73
 III. Kesimpulan dan Rekomendasi	 77
 Referensi	 79

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ADD	: Anggaran Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Balita	: Bayi di bawah usia lima tahun
Bansos	: Bantuan Sosial
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BST	: Bantuan Sosial Tunai
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
DD	: Dana Desa
Dukuh	: Bagian terkecil dari desa
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kades	: Kepala Desa
Kadus	: Kepala Dusun
Kaur	: Kepala Urusan
Kasie	: Kepada Seksi
Lingkungan	: Bagian terkecil dari desa
Lansia	: Lanjut Usia
Musrenbangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
Musdes	: Musyawarah Desa
Musdus	: Musyawarah Dusun
Perdes	: Peraturan Desa

Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Posbindu	: Pos Bantuan Induk
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PBI	: Penerima Bantuan Insentif
PKK	: Program Kesejahteraan Keluarga
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
SDGs	: Sustainable Development Goals
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	: Surat Keputusan
SK	: Surat Keterangan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tanah Kas Desa	: Tanah yang disediakan desa untuk menjadi aset desa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KATA PENGANTAR

Kalyanamitra bekerjasama dengan Oxfam Indonesia melaksanakan program *The Indonesian Women in Leadership* (I WIL). Program ini mendukung komunitas masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk mempromosikan keadilan gender dengan meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan, mendorong partisipasi politik perempuan, pengambilan keputusan dan kepemimpinan serta menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tujuan umum program ini ialah agar perempuan, perempuan muda dan anak perempuan di Indonesia Timur semakin mandiri secara ekonomi, terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, menduduki posisi kepemimpinan, dan terbebas dari kekerasan berbasis gender.

Program ini diharapkan berdampak positif terhadap perempuan dengan terbukanya akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Semakin banyak perempuan terlibat dalam peran kepemimpinan dalam ekonomi, politik dan sosial di komunitas ataupun di level desa diharapkan pembangunan menjadi responsif gender. Program ini juga terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan-1, 5, dan 8. Pada Tujuan-1 yang hendak dicapai ialah penghapusan kemiskinan; Tujuan-5 ialah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; dan Tujuan-8 ialah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dalam program ini bersaling-silang dengan prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan dan perencanaan mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa.

Buku ini merupakan dokumentasi lapangan yang berupaya memotret bagaimana desa berupaya mencapai SDGs Desa Tujuan-1,5, dan 8 di 21 desa di

Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tentu saja dokumentasi ini penting dalam kerangka program I WIL, karena setidaknya di tingkat lapangan tergambarkan sejauhmana desa mencapai kesadaran akan kesetaraan gender dengan pelibatan perempuan dan anak perempuan secara inklusif dalam pembangunan desa.

Buku ini sebagai pengalaman pembelajaran lapangan dalam mencapai Tujuan-1, 5, dan 8 di 21 desa tersebut paling tidak memberikan pembelajaran bahwa implementasi SDGs Desa yang konsisten, terpadu, terbuka, dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang berkepentingan. Tentu pengalaman implementasi SDGs di 21 desa yang tertuang di buku ini memperlihatkan bagaimana capaian setiap desa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemerintahan desa, komunitas masyarakat sipil, dan masyarakat desa harus bahu-membahu melaksanakan tujuan tersebut demi terciptanya masyarakat desa yang adil makmur, sejahtera, dan setara gender.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan masyarakat, bangsa, dan perempuan serta anak perempuan di Indonesia.

Jakarta, 06-06-2023

Kalyanamitra

I

PENDAHULUAN

Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip yang universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (*no one left behind*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang berakhir pada 2015 lalu.¹

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai komitmen global telah disepakati dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. Pemahaman terhadap TPB dengan 4 pilarnya serta tujuan, target dan indikatornya adalah langkah awal bagi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk merencanakan dan mengimplementasikan TPB agar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2024, sehingga menjadi tujuan yang harus dicapai dengan alokasi anggaran yang tersedia melalui APBN, APBD dan APBDDes. Untuk mewujudkan hal itu dari tingkat pusat hingga daerah (termasuk desa), pemerintah telah melahirkan Perpres No.59 Tahun 2017

1. <https://sdgs.bappenas.go.id/>

tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional. Pemerintah juga membuat Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah untuk memastikan bahwa TPB dilaksanakan secara konsisten.

Di Indonesia, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejak 2015 hingga kini tidak berjalan mudah, karena hambatan-hambatan struktural, personil dan anggaran. Hambatan-hambatan struktural menyangkut birokrasi yang tidak mendukung (tidak efisien dan efektif). Di tataran personil, kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah paradigmanya belum banyak berubah. Peran mereka sebagai pelayan publik belum menjadi jatidiri dan perilaku mereka. Kecenderungannya justru warga masyarakat yang harus melayani mereka. Dari sisi anggaran, sejak berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dana pembangunan desa dapat dialokasikan secara pasti. Sebelumnya, dana pembangunan desa tidak jelas dari mana sumbernya, untuk kepentingan apa, dan bagaimana mengkonversikannya menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan yang mensejahterakan warga masyarakat desa.

Sejak 2019, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa (SDGs Desa), dengan beragam tipologi desa yang ada dan kategorisasi desa yang dibuat oleh pemerintah selama ini, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Perpres No.59 tahun 2017, menerjemahkan hal itu menjadi TPB Desa dengan menambahkan satu tujuan lagi, sehingga memiliki 18 Tujuan.

Dan tidak hanya persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas yang menjadi kendala dalam implementasi dan capaian TPB kurun waktu selama ini. Di tingkat desa, TPB desa secara umum masih sulit dipahami dan memaknainya dalam bentuk laporan capaian SDGs dari 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator yang ada. Sosialisasi TPB yang tidak merata dan konsisten di seluruh desa yang jumlahnya kurang lebih 82.000 desa selndonesia serta berganti-gantinya aparatur pemerintahan desa menyebabkan TPB desa terkendala untuk diwujudkan. Desa-desanya masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan guna memastikan bahwa TPB desa dipahami, diwujudkan dan dicapai seoptimal mungkin.

Walapun prinsip TPB ialah 'tidak ada satu orang pun terlewatkan, namun realitas pembangunan di desa kerap melewati dan meninggalkan kelompok

marjinal, seperti perempuan, anak-anak, disabilitas dan lainnya. Selama ini aspirasi mereka masih tidak dianggap penting (*voiceless*) dan kebutuhan praktisnya kurang diejawantahkan dalam program pembangunan desa. Mereka hanya menjadi stempel legalitas untuk mensahkan berlakunya pembangunan. Mereka tidak terlibat dalam proses perencanaan, tidak menerima manfaat, tidak memiliki kuasa kendali, tidak memiliki hak memutuskan, dan tidak tersedia akses yang setara dalam pembangunan yang ada.

Pembangunan yang inklusif mensyaratkan keterlibatan, pengenalan hak dan identifikasi kebutuhan khusus kelompok terpinggirkan (marjinal) dalam setiap tahapan dan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan adalah rencana yang terpadu dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan berpihak kepada kelompok terpinggirkan. Wujud perhatian, pertimbangan dan keberpihakan ini dapat dilihat baik dalam proses penilaian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring) serta evaluasi dengan melibatkan kelompok terpinggirkan melalui bentuk program yang dimuat dalam RPJMD, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Perlu keterlibatan dan kontribusi semua pihak agar ruang partisipasi demokrasi, kesetaraan peluang dan manfaat pembangunan dapat diakses, dinikmati dan dikontrol oleh semua warga masyarakat desa, khususnya perempuan desa.²

Perencanaan pembangunan yang memperhatikan, memasukkan pengalaman aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian masalah perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa dikenal sebagai Perencanaan Responsif Gender (PRG). Isu lain yang terkait dengan PRG ini adalah Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran ini adalah anggaran yang memberikan dampak dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki. Syarat untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik, dalam hal ini, kepala desa atau lurah.³

Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan merujuk kepada UU ini, pembangunan desa harus menghapus segala bentuk diskriminasi agar perempuan desa sejak dari perencanaan, implementasi,

2 Retno Kusumawiranti, *POPULIKA*, Vol. 9, No. 1, 2021, 12-19.

3 Idem

pengawasan, manfaat, dan lainnya dapat terlibat penuh. Tidak boleh mereka terlewatkan dan apalagi dengan sengaja dilupakan. Pembangunan desa harus inklusif dan adil gender. Perempuan desa adalah sumber daya yang vital dalam mencapai TPB desa.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di desa harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan strategis perempuan desa. Pemenuhan minimal kebutuhan ini di tingkat desa dapat dilihat setidaknya-tidaknya dengan indikasi-indikasi berikut:

1. Perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa melalui Musdus, Musdes, Musrenbangdes, dan lainnya (secara kuantitas dan kualitas).
2. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual, perkawinan anak, KDRT, dan sebagainya).
3. Tersedia anggaran desa yang responsif gender (minimal 8-10 persen dari total anggaran).
4. Tersedia kebijakan yang responsif gender (Perdes tentang penghapusan perkawinan anak, perdagangan orang, pelibatan laki-laki; Perdes ekonomi, dan lainnya).
5. Program pembangunan desa yang responsif gender (penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, penghapusan *stunting*, sanitasi dan air bersih, gizi, disabilitas, dan lain-lain).
6. Terjadi perubahan relasi gender dalam hidup sehari-hari (pola pikir dan tindakan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa).
7. Tersedia program peningkatan ekonomi perempuan desa (peningkatan keterampilan wirausaha, akses modal kerja, jaringan pemasaran, legalitas usaha, dan lain-lain).
8. Tersedia infrastruktur desa yang bermutu dan inklusif bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.

II

UPAYA MEMOTRET CAPAIAN

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam praktik SDGs Desa oleh pemerintahan desa, diperlukan sarana yang dapat memotret capaian implementasi di tingkat desa. Sarana ini setidaknya membantu mempermudah pihak desa dalam membuat laporan SDGs Desa yang tentu dapat diintegrasikan dalam laporan pembangunan desa setiap tahunnya sesuai program di Rencana Kerja Pembangunan Desa. Sarana ini memotret dan mendokumentasikan praktik-praktik berharga implementasi SDGs Desa khususnya untuk Tujuan 1,5 dan 8.

A. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk di provinsi Nusa Tenggara Barat, upaya memotret capaian SDGs di tingkat desa dilaksanakan di 9 desa, yakni Batu Tulis, Nyerot, Sukarara, Ubung, Pringgasela Selatan, Jurit Baru, Beriri Jarak, Pagutan, Pemepek. Kesembilan desa ini tersebar di 4 kecamatan dan di 2 kabupaten (Lombok Timur dan Lombok Tengah).

1. Desa Batu Tulis

Desa Batu Tulis memiliki luas 3,13 km² (4,37%) dari Jonggat yang berada di kurang dari 500 mdpl. Jarak Desa Batu Tulis ke ibukota kecamatan sekitar 7

km, dan ke ibukota kabupaten sekitar 8 km. Desa Batu Tulis terbagi menjadi 4 Dusun, dan 25 RT. Penduduk Desa Batu Tulis saat ini berjumlah 4214 jiwa yang terdiri dari 2105 laki-laki dan 2109 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 1358 KK, terdiri dari 1231 KK laki-laki dan 127 KK perempuan. Sebanyak 431 KK masuk dalam kategori miskin. Ada 267 KK laki-laki dan 58 KK perempuan masuk kategori sangat miskin (ekstrim).

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 24,21)

Untuk mencapai Tujuan-1 ini, program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Tulis adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD). Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- Penerima manfaat program ini mencapai 125 Kepala Keluarga (KK) yang masing-masing menerima Rp. 300.000,- per bulan, serta diberikan per triwulan sebesar Rp. 900.000,-

Penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin ini dialokasikan melalui BLT-DD, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). Alokasinya menggunakan 40% dari total Dana Desa yang mencakup 125 KK penerima manfaat. Penerima PKH sebanyak 324 KK dan BPNT sejumlah 400 KK.

Untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, ada 13 orang penerima manfaat program ini. Alokasi anggaran yang dikeluarkan desa sebesar Rp. 25.670.400,- Dalam dokumen SDGs milik Kementerian Desa, tercatat 39 KK menerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah.

Untuk layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian yang layak, pemerintah desa telah membangun 1 unit Pasimas, 2 sumur bor dan 10 unit RTLH. Saat ini, ada 40 rumah tidak layak huni (RTLH) masih ditemukan di desa. Terkait sarana kesehatan, tersedia 6 Posyandu Balita, 6 Posyandu Lansia dan 6 Posyandu Remaja, 1 Puskesmas pembantu dan 1 Posdes.

Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan desa, maka capaian SDGs Tujuan-1 memperoleh skor 24,21.



b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 50,00)

Adanya Perdes ataupun SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (minimal 30%) menjadi indikasi capaian SDGs Tujuan-5. Di Batu Tulis, ada 5 kebijakan terkait hal itu, yakni (1) Peraturan Desa Batu Tulis No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) SK Kepala Desa Batu Tulis No. 30 Tahun 2021 tentang Paralegal; (3) SK Kepala Desa Batu Tulis No. 3 Tahun 2022 tentang Pokja Posyandu; (4) SK Kepala Desa Batu Tulis No. 4 Tahun 2022 tentang Kader Pembangunan Manusia, dan (5) SK Kepala Desa Batu Tulis No. 5 Tahun 2022 tentang Kader Posyandu. Untuk mendukung kebijakan yang ada, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran Rp103.389.850,- untuk operasional kader Posyandu, PKK, KPM.

Adanya SK Paralegal dan Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berkontribusi pada penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Terkait layanan yang dilakukan, pemerintah desa bekerjasama dengan paralegal untuk menangani kasus-kasus perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta

peningkatan kesadaran. Pemerintah desa menyelenggarakan berbagai forum pertemuan dan sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, misalnya dengan Konsorsium Adara NTB, Puskesmas, dan UPT PPA. Banyak pihak pula yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti kepala dusun, anggota BPD, kader dan remaja yang cukup umur untuk menikah. Untuk itu, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran Rp2.330.500,-

Angka kematian remaja usia 15-19 tahun yang melahir tidak ditemukan di Batu Tulis (*age specific fertility rate/ASFR*). Angka partisipasi sekolah di Desa Batu Tulis tahun 2022, tercatat 5 anak yang putus sekolah. Rata-rata ijazah sekolah tertinggi masih SMP sederajat. Di Batu Tulis, hanya ada 2 jenjang pendidikan yang tersedia, yaitu PAUD dan SD; sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak tersedia. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp2.132.500,- untuk masalah tersebut.

Perempuan yang berpartisipasi menjadi anggota Badan Permusyawaratan hanya ada 1 or dari tujuh anggota yang ada (14,2%). Demikian pula perempuan yang terlibat di perangkat desa, hanya ada 2 orang (16,6%) dari dari 12 orang yang ada.

Keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbangdes hanya 15 perempuan (25%) dari 60 peserta yang hadir. Di forum Musdes, hanya 24 perempuan (34.28%) dari 70 peserta yang ada.

Untuk SDGs Tujuan-5, dalam dokumen Kemendes, desa ini hanya mencapai skor 50,00.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 22,15)

Untuk mencapai Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun, pemerintah desa memaksimalkan kinerja BUMDes dan Tanah Kas Desa. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp9.000.000,- Dari yang dilakukan oleh desa, PAD Batu Tulis tahun 2022 tercatat Rp5.000.000,-

Pemerintah desa juga memfasilitasi masyarakat memperoleh surat izin usaha guna mempermudahajuan pinjaman di bank, koperasi, dan lainnya.

Saat ini, di Batu Tulis ada 10 pelaku UMKM yang bergiat. Pemerintah desa berusaha memaksimalkan keterlibatan warga desa dalam program Padat Karya Tunai Desa. Tercatat ada 215 warga desa yang terlibat dalam PKTD ini. Untuk itu, pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa Rp112.160.000,- Bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Tenaga Kerja daerah, pemerintah desa melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi warga desa untuk memperoleh sertifikat. Apa yang dilakukan pemerintah dengan Tujuan-8 ini, di dokumen Kementerian Desa hanya mencapai skor 22,15.

2. Desa Nyerot

Luas Desa Nyerot sekitar 4,11 km² (5,74%) dari luas Jonggat dan berada kurang dari 500 mdpl. Jarak Desa Nyerot ke ibukota kecamatan sekitar 5 km, sementara ke ibukota Kabupaten sekitar 6 km. Desa Nyerot terbagi menjadi 6 Dusun, 6 RW dan 25 RT. Penduduk Desa Nyerot sebanyak 4.578 jiwa, yang terdiri dari 2.174 jiwa laki-laki dan 2.404 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbagi menjadi 1.618 KK, yang terdiri dari 1.373 KK laki-laki dan 248 KK perempuan. Ada 275 KK masuk dalam kategori miskin yang terdiri dari 184 KK laki-laki, dan 91 KK perempuan. Jumlah KK sangat miskin sekitar 25 KK, yang terdiri dari 11 KK laki-laki, dan 14 KK perempuan.



a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor 21,33)

Pemerintah desa ini untuk mendukung capaian SDGs Tujuan-1 dengan memberikan BLT-DD dan peningkatan kapasitas kelompok ekonomi. Untuk BLT-DD, dialokasikan anggaran desa sebesar Rp324.000.000,- (54%) kepada penerima bansos BLT-DD tahun 2022. Jumlah penerima manfaat bansos tersebut sebanyak 108 orang (diterima selama 12 bulan). Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi menerima alokasi anggaran desa sebesar Rp27.600.000,- Pelatihannya ialah membuat ingke dan menjahit bagi kelompok perempuan.

Warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp21.000.000,- Pemerintah desa mengalokasikan anggaran BLT-DD dengan penerima manfaat 108 orang. Berdasarkan data, 70% warga miskin telah mendapatkan PKH dan BPNT.

Pemberian PMT untuk bayi dan balita, ibu hamil yang mengalami KEK, gizi buruk dan BGM serta pembangunan Pamsimas untuk keluarga miskin menerima layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian yang layak. Untuk itu, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp46.000.000,- yang didistribusikan ke 6 Posyandu. Pamsimas desa sendiri mendapat alokasi anggaran desa sebesar Rp368.702.000,- Pencapaian SDGs Tujuan-1 di Desa Nyerot mendapat skor 21,33.



b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 0,00)

Ada 5 kebijakan yang responsif gender tersedia di Desa Nyerot, yakni (1) Peraturan Desa No.2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) SK Kepala Desa Nyerot No. 19 Tahun 2022 tentang Paralegal; (3) SK Kepala Desa Nyerot tentang PKK, SK Kepala Desa Nyerot tentang Posyandu; (4) SK Kepala Desa Nyerot tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan (5) SK No. 23 Tahun 2022 tentang Kelompok Usaha dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Pemerintah desa melakukan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan kepada peserta kelompok yasinan, perwakilan tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Posyandu remaja dan pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui program PKK Pokja 3 dengan alokasi anggaran Rp26.000.000,- Untuk pemanfaatan pekarangan, desa mengalokasikan anggaran Rp19.3000.000,-

Keberadaan paralegal di desa mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya 5 kasus kekerasan berhasil ditangani. Pemerintah desa juga bekerjasama dengan Unit PPA. Untuk angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*), tahun 2022 tercatat 5-6 kasus kelahiran.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa saat ini, hanya ada 1 orang perempuan (14,2%) dari 7 anggota BPD serta 3 orang perempuan (21,4%) dari 14 orang perangkat desa. Perempuan yang turut serta dalam pengambilan keputusan dari 86 orang peserta Musdes dan Musrenbangdes hanya 40 orang perempuan yang hadir (46,5%). Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa ini belum terdokumentasi dan dilaporkan secara baik, sehingga skornya 0,00.

c. Tujuan-8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor 39,44)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas 30 juta per tahun justru di Nyerot pada 2022 tidak mencapai hasil, karena sumberdaya yang tidak tersedia. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp364.000.000,- dari APBDes pada 2022 untuk pembangunan fisik yang dikerjakan oleh para laki-laki.

Dalam dokumen SDGs Kementerian Desa, capaian Tujuan-8 Desa Nyerot hanya memperoleh skor 39,44.

3. Desa Sukarara

Desa Sukara memiliki luas 7,88 km² (11,01%) dari luas Jonggat, dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Jarak Sukarara ke ibukota kecamatan sekitar 9 km, sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 7 km. Desa ini terbagi menjadi 10 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil. Di pemerintahan terdiri dari 3 pelaksana teknis dan 10 pelaksana kewilayahan. Penduduk Desa Sukarara berjumlah 13.224 jiwa, yang terdiri dari 6.530 laki-laki dan 6.694 perempuan (9,44%) dari total penduduk Jonggat, dan kepadatan penduduk 1298 per km². Ada 4.669 KK yang terdiri dari 4011 KK laki-laki dan 658 KK perempuan. Terdiri dari 963 KK laki-laki dan 86 KK perempuan miskin. Dan ada 249 KK yang sangat miskin (ekstrim).

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 30,42)

Program Desa Sukarara adalah peningkatan kapasitas pemasaran digital dan menjahit bagi kelompok ekonomi. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp27.6000.000,- Sasaran pelatihan ini adalah 54% penerima bantuan sosial. Pemerintah desa juga memberikan BLT-DD dengan alokasi anggaran Rp720.000.000,-



Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp21.000.000,- yang digunakan untuk BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan perangkat desa. Di Desa Sukarara hanya 46% KK yang memiliki BPJS.

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp324.000.000,- untuk BLT-DD dan verifikasi serta validasi data kemiskinan. Ada 70% warga miskin di desa Sukarara yang mendapatkan PKH, BPNT, dan BLT DD.

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk PMT bayi dan balita, PMT ibu hamil KEK, gizi buruk dan Balita BGM sebesar Rp46.000.000,- Selain itu, kegiatan Pamsimas mendapat anggaran Rp368.702.000,- Di Sukarara, baru 1621 KK yang memiliki akses air minum dari total 4.669 KK. Pemerintah desa mengalokasikan 10-25% anggaran desa untuk keluarga miskin yang melanjutkan pencegahan dampak Covid-19 melalui pemberian BLT-DD. Dilihat dari dokumen Kementerian Desa, capaian Tujuan-1 Desa Sukarara mendapat skor 30,42.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 64,01)

Peraturan atau kebijakan yang dilahirkan pemerintah Desa Sukarara dalam rangka pemberdayaan perempuan tercatat ada 4, yakni (1) Peraturan Desa No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) SK No. 10



Tahun 2021 terkait dengan Paralegal; (2) SK No. 2 Tahun 2022 terkait dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan (4) SK No. 4 Tahun 2022 tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp5.700.000,- untuk pengadaan alat. Selain itu, dialokasikan anggaran sebesar Rp26.000.000,- guna mendukung penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dan Posyandu Remaja. Kegiatan lain yang didanai desa adalah pemanfaatan pekarangan rumah oleh Pokja 3 PKK, sebesar Rp19.300.000,-

Peran paralegal di desa tersebut sangat penting, karena berhasil menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, mengadakan sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dusun-dusun, serta 5 kasus kekerasan berhasil diadvokasi.

Perkawinan anak di Desa Sukarara dapat menghambat capaian Tujuan-5. Tahun 2022, ada 6 kasus perkawinan anak. Untuk ini, pemerintah desa memberikan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dan sosialisasi bahaya perkawinan anak. Berdasarkan catatan tahun 2022, ada 12 anak yang putus sekolah. Saat ini, di Desa Sukarara memiliki 4 unit PAUD, 4 unit TK, 3 unit SD sederajat, 2 unit SMP, dan 1 unit SMA.

Perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa sampai saat ini sulit terpenuhi minimal 30%. Dari 9 anggota BPD hanya ada 1 perempuan (11,1%), sedangkan dari 6 perangkat desa, tidak ada satu pun yang perempuan. Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, dari 60 orang peserta hanya 30 orang perempuan yang hadir (50%). Dalam laporan SDGs desa di Kementerian Desa, Tujuan-5 Desa Sukarara hanya mencapai skor 64,01.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 36,18)

Tahun 2022, Pendapatan Asli Desa Sukarara mencapai Rp40.000.000,- Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk mendukung capaian tujuan ini adalah penyertaan modal ke Bumdes Karya Sejati Sukarara setiap tahun.

Untuk mendukung pencapaian indikator Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa, maka pemerintah mengalokasikan anggaran Rp364.000.000,-

4. Desa Ubung

Desa Ubung memiliki luas 6,9 km² (9,77%) dari total luas Jonggat. Desa ini terbagi menjadi 14 Dusun dan 64 RT. Jarak ke ibukota kecamatan sekitar 1 km dan ke ibukota kabupaten sekitar 13 km. Penduduk Desa Ubung saat ini berjumlah 11745 jiwa, yang terdiri dari 5664 laki-laki dan 6081 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 1081 KK laki-laki dan 2500 KK perempuan.



- a. **Tujuan-1** (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 20,60)

Pemerintah desa memberikan BLT-DD dengan anggaran Rp655.200.000,- sekaligus dengan pendataan keluarga miskin. Saat ini, di Desa Ubung tercatat 2752 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang terdiri 1200

KK laki-laki dan 1552 KK perempuan. Keluarga yang menerima PKH berjumlah 951, yang terdiri dari 251 KK laki-laki dan 700 KK perempuan.

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp31.000.000,- untuk BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Warga penerima KIS/BPJS PBI tercatat 4841 orang yang terdiri dari 2000 laki-laki dan 2841 perempuan.

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp179.770.500,- untuk pemberian PMT bayi dan balita, ibu hamil KEK, dan gizi buruk. Di Desa Ubung ada 14 Posyandu Balita, 14 Posyandu Lansia, dan 14 Posyandu Remaja. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran Rp21.600.000,- untuk Pamsimas. Saat ini, tercatat 450 KK yang terdiri dari 250 KK laki-laki dan 200 KK Perempuan menjadi pelanggan Pamsimas. Pemberian honor guru PAUD desa selama 12 bulan. Ada 4 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Kelompok/Taman Bermain Anak). SDGs Tujuan-1 Desa Ubung mencapai skor 20,60.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 44,74)

Perdes ataupun SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan menjadi capaian SDGs Tujuan-5. Untuk ini, beberapa kebijakan dilahirkan oleh pemerintah desa, yaitu (1) SK Kepala Desa tentang Kader Posyandu; (2) SK Kepala Desa tentang Kelompok Perempuan; (3) SK Kepala Desa tentang Paralegal; (4) SK Kepala Desa tentang PKK, dan (5) SK Kepala Desa tentang BPD. Kebijakan tersebut mendukung perempuan mendapatkan layanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Saat ini, di Desa Ubung ada 14 Posyandu Balita, 14 Posyandu Lansia, dan 14 Posyandu Remaja.

SK Paralegal membantu menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di desa. Pemerintah desa melakukan pendataan kasus kekerasan berbasis gender dan penanggannya. Juga pendampingan kasus perkawinan anak dan sosialisasi pendewasaan perkawinan di sekolah-sekolah. Untuk partisipasi pendidikan, diperlukan sarana pendidikan. Di Desa Ubung ada 4 unit PAUD, 1 Unit TK, 8 unit SD sederajat, 4 unit SMP dan 4 unit SMA.

Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa saat ini hanya 1 orang perempuan dari 9 anggota BPD (11,1%). Di perangkat desa, dari 21 orang tidak ada satupun perempuan. Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes minimal 30%, hanya 10 perempuan (16,6%) dari 60 peserta yang hadir. Capaian SDGs Tujuan-5 desa ini di dokumen Kemendes mencapai skor 44,74.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 25,84)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan capaian Tujuan-8. Pada 2022, PAD dipegang pihak BUMDes, sehingga belum diketahui berapa jumlahnya. Berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak masyarakat yang menganggur.

Akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro) melalui Bank Pemerintah, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, serta Koperasi Simpan Pinjam. BUMDes juga menyediakan modal simpan pinjam. Keberadaan BUM Desa menjadi pendukung ekonomi desa. Capaian SDGs Tujuan-8 di desa ini di dokumen Kemendes mencapai skor 25.84.

5. Desa Pringgasela Selatan

Desa Pringgasela Selatan luasnya 4,16 km² (12,21%) dari luas Kecamatan Pringgasela dengan ketinggian 312 mdpl. Pusat pemerintahan ada di Gubung Rempung. Jarak Desa Pringgasela Selatan ke ke ibukota kecamatan sekitar 2 km, sementara ke ibukota kabupaten sekitar 9 km. Desa Pringgasela Selatan terbagi menjadi 7 Dusun, 8 RW dan 56 RT, dengan mayoritas penduduk sebagai petani. Penduduk desa berjumlah 8270 jiwa yang terdiri dari 4150 laki-laki dan 4120 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 2645 KK, yang terdiri dari 2117 KK laki-laki dan 528 KK Perempuan. Jumlah penduduk Desa Pringgasela Selatan 12,21% dari total penduduk Pringgasela.



a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 20,58)

Untuk Tujuan-1 ini, program yang dilakukan pemerintah desa ialah memberikan bantuan BLT-DD yang ditujukan bagi 137 KK, terdiri dari 50 KK laki-laki dan 87 KK perempuan. Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap, yakni setiap 3 bulan (Rp900.000,-) Alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebesar Rp493.200.000,- Untuk keluarga miskin penerima bantuan sosial, tercatat 384 KK dan penerima PKH, dan 501 KK penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan tercatat 4074 warga sebagai peserta KIS/BPJS PBI, dan 830 warga sebagai penerima BPJS nonPBI/Mandiri. Dalam dokumen Kementerian Desa, tercatat 240 KK menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Hampir semua rumah tangga di Desa Pringgasela Selatan memiliki akses air minum yang baik. Tercatat ada 18 rumah yang masih berlantai tanah. Di Desa Pringgasela Selatan ada 10 Posyandu Balita, 10 Posyandu Lansia, dan 10 Posyandu Remaja dan satu Puskesmas pembantu. Kesehatan menjadi isu penting di Desa Pringgasela Selatan, karena tahun 2022 tercatat 4 kasus kematian bayi, yang terdiri dari 1 bayi laki-laki dan 3 bayi Perempuan. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani pada 2022 ada 10 rumah yang menjadi korban bencana. Untuk itu, pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa Rp12.000.000,- per KK yang rumahnya tertimpa bencana. Capaian SDGs Tujuan-1, desa ini mencapai skor 20,58.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 59,65)

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan besar di Desa Pringgasela Selatan. Berdasarkan data tahun 2022, tercatat 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan angka cerai hidup di Desa Pringgasela Selatan cukup banyak. Berdasarkan data tahun 2022, ada 232 warga yang berstatus cerai hidup yang terdiri dari 57 laki-laki dan 175 perempuan.

Adanya Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan menjadi indikator capaian SDGs Tujuan-5 ini. Di Pringgasela Selatan, ada 4 kebijakan yang mendukung hal itu, yakni (1) Peraturan Desa Pringgasela Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Keputusan Kepala Desa Pringgasela Selatan Nomor 145/08/Prisel/2020 tentang *reshuffle* Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pringgasela Selatan; (3) Keputusan Kepala Desa Pringgasela Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengurus Paralegal Desa Pringgasela Selatan; (4) Keputusan Kepala Desa Pringgasela Selatan Nomor 145/.../PEM/2021 tentang Pengurus Kelompok Dasa Wisma "SEHATI" wilayah Gubuk Lauk Desa Pringgasela Selatan.

Keberadaan kebijakan-kebijakan itu setidaknya berkontribusi bagi perempuan desa untuk mendapatkan layanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi dan lainnya. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp10.000.000,- untuk TP PKK. Selain itu, paralegal melakukan sosialisasi kepada



semua pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah desa dan paralegal juga melakukan mediasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Untuk usia kawin pertama perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), pemerintah desa melakukan sosialisasi Perdes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Jumlah anak yang melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) tahun 2022 tercatat 112 remaja.

Untuk angka partisipasi SMA/SMK/MA/ sederajat yang berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dan pendidikan S2 ada 10 warga. Mayoritas warga desa menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA sederajat.

Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa saat ini dari 9 anggota BPD, hanya ada 1 perempuan (11,1%). Di perangkat desa, hanya 1 orang perempuan (7,1%), dari 14 orang. Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, dari 50 peserta hanya ada 5 perempuan. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk capaian SDGs Tujuan-5, tercatat di Kemendes dengan skor 59,65.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 22,70)

Untuk mencapai Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah lelang tanah pecatu atau sewa tanah dan retribusi sampah. Untuk ini, anggaran yang dikeluarkan desa sebesar Rp26.000.000,- Selain itu, pemerintah desa mengeluarkan anggaran untuk BUMDes Bina Permata dengan alokasi Rp50.000.000,- Tercatat PAD Pringgasela Selatan tahun 2022 sebesar Rp29.000.000,-

Terkait akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), tercatat ada 1209 UMKM dan 21 keluarga anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)/P3KB serta 2 lembaga permodalan formal (bank dan lembaga keuangan mikro). Untuk wisata dan kontribusi mencapai 8% Pendapatan Desa, tahun 2022 tercatat 2570 wisatawan yang berkunjung di desa ini.

6. Desa Jurit Baru

Desa Jurit Baru memiliki luas 18,53 km² (11,09%) dari luas Kecamatan Pringgasela yang berada di ketinggian 568 mdpl. Desa Jurit Baru ada di wilayah paling timur Pulau Lombok. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun Bolen. Jarak dari Desa Jurit Baru ke ibukota Kecamatan sekitar 8 km, sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 19 km. Desa Jurit Baru terbagi menjadi 11 Dusun dan 68 RT, dengan jumlah penduduk sekitar 7.867 jiwa, yang terbagi menjadi 4017 laki-laki dan 3.850 perempuan. Sebagian besar penduduk, bersuku



Sayak. Jumlah penduduk terbagi menjadi 2.606 Kepala Keluarga (KK), dimana ada 2.167 KK laki-laki dan 439 KK perempuan.

Sebagian besar Kepala Keluarga di Desa Jurit Baru masuk kategori miskin sebanyak 1.846. Sedangkan 101 KK, masuk kategori sangat miskin. Ada 659 KK masuk kategori tidak miskin. Sebagian besar penduduk Desa Jurit Baru bermata pencaharian petani, baik petani pemilik lahan maupun buruh tani.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 6,38)

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp730.800.000,- untuk pemberian BLT kepada masyarakat miskin. Ada 203 KK miskin yang memperoleh BLT-DD. Pemberian ini diharapkan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. Untuk peserta SJSN Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan ketegakerjaan di Desa Jurit Baru terdistribusi 2.927 BPJS PBI dan nonPBI.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah Desa Jurit Baru, yakni pemberian makan tambahan untuk balita Rp33.432.000,- dengan sasaran 11 Posyandu; pembangunan RTLH dengan anggaran Rp150.650.000,- Pengadaan perpipaan air bersih dengan anggaran Rp252.758.000,- Pemberian insentif kader dengan anggaran Rp90.000.000,- untuk 50 orang Kader Posyandu dari 11 posyandu.

Pemberian bantuan sarana belajar PAUD dengan anggaran Rp13.500.000,- untuk 8 PAUD. Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD dengan anggaran Rp5.700.000,- dengan sasaran 50 pendidik PAUD. Pendidikan Alquran dengan anggaran Rp30.900.000,- Fasilitas mck dengan anggaran Rp46.475.000,- Desa Jurit Baru semua rumah tangga telah memiliki akses air minum yang baik. Jika dilihat di dokumen Kementerian Desa, capaian SDGs Tujuan-1 Desa Jurit Baru skornya 6,80.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 53,18)

Adanya Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan menjadi capaian SDGs Tujuan-1. Beberapa peraturan dikeluarkan oleh Desa Jurit Baru, seperti (1) Peraturan Desa No. 02 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) SK KPKK Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Perempuan Kritis dan Kreatif; (3) SK KWT Nomor 188.4/05/DJB/2022 tentang Pembentukan Kelompok Wanita Tani; (4) SK Paralegal Nomor 188.4/04/DJB/2022 tentang Pembentukan Paralegal.

Pemerintah desa juga mengeluarkan SK Operator SID Nomor 188.4/49/DJB/2021 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Desa dengan anggaran Rp1.800.000,- Dengan ini terakses informasi kebutuhan perempuan dan memberikan peluang kepada perempuan dalam perencanaan pembangunan desa jangka panjang. Ada SK kader KPM dan kader KB Nomor 141.85/1379/DJB/2019 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia. Alokasi anggaran desa untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) Rp 90.000.000,-

Peraturan-peraturan desa tersebut ikut mendorong turunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Juga tersedia Posko yang mempermudah perempuan mendapatkan layanan pengaduan di desa. Pemasangan papan informasi alur pengaduan di tempat-tempat strategis serta sosialisasi tentang Peraturan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak juga dilakukan. Pemerintah desa juga mengeluarkan Perdes No. 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kader Posyandu dan PLKB melakukan sosialisasi “Bahaya Menikah di



Bawah Umur” dan “Usia Ideal Melahirkan” di Posyandu Remaja. Berdasarkan data tahun 2022, tercatat 19 remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan.

Agar angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat meningkat, pemerintah desa melakukan kejar paket A, B dan C untuk anak putus sekolah. Kegiatan ini dilakukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Social Care. Di Desa Jurit Baru, tercatat ada 8 PAUD, 6 SD Sederajat, 1 SMP, 2 SMA dan 2 PKBM.

Partisipasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkat desa masih rendah. Saat ini, dari 9 anggota BPD hanya 1 perempuan (11,1%). Pemerintah desa melakukan sosialisasi ke dusun-dusun tentang keterwakilan Perempuan. Perempuan di perangkat desa hanya ada 2 orang perempuan (11,1%) dari 18 orang.

Keterlibatan perempuan dalam Musdes dan Musrenbangdes di Desa Jurit hanya 30 perempuan yang hadir dari 80 orang undangan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Jurit Baru mendukung pencapaian SDGs Tujuan-5, tercatat di Kementrian Desa memperoleh skor 41,35.

c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor 24,18)

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-8. Berdasarkan data SDGs di Kemendes, PAD Jurit Baru mencapai Rp82.278.641,- Perolehan ini mendapatkan skor 100 untuk indikator Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp 30 juta per tahun. Untuk ini, pemerintah desa menyuntikkan modal ke Bumdes Gunung Kukus Jurit Baru sebesar Rp66.000.000,- PADes dari BUMDES diperoleh sebesar Rp15.000.000,-

Untuk akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), pemerintah desa memberikan bantuan dari Dinas Koperasi untuk KPKK. Pemberian pinjaman modal untuk pelaku usaha oleh Bumdes dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,-

Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah pelibatan masyarakat miskin untuk kegiatan infrastruktur atau pertanian dengan anggaran Rp65.976.000,- Kegiatan ini menciptakan kesempatan bekerja bagi 100 orang warga miskin di Desa Jurit Baru.

Untuk mendukung angkatan kerja baru, pemerintah desa melakukan pelatihan pupuk organik dengan anggaran Rp17.495.000,- dan pelatihan manajemen usaha kelompok kecil Rp13.231.000,- Pelatihan ini meningkatkan kemampuan 50 orang warga desa dalam pembuatan pupuk organik dan 35 orang di kelompok usaha mengerti menjalankan manajemen usaha.

Indikator wisata mencapai 8% Pendapatan Desa, pemerintah desa telah membangun berbagai macam atraksi wisata, seperti selamatan mata air (*roah pengempel*), pengambilan air nira (*nyadek*), ngentongin sapi dan sebagainya. Desa wisata Jurit Baru memiliki potensi wisata alam, kuliner, dan religi yang besar. Wisata alam yang dimiliki berupa Gunung Kukus, air terjun, terasering. Wisata kuliner berupa pengolahan air nira menjadi gula merah, ekstrak jahe, pengolahan nanas dan lainnya. Wisata religi berupa pembacaan daun lontar,

dzikir zaman, hiziban, dan sebagainya. Jurit baru memiliki musik tradisional, seperti gendang, beleq, klenang dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan kerja yang layak, semua itu turut menyumbang pencapaian SDGs Tujuan-8 di Desa Jurit Baru yang memperoleh skor 48,27.

7. Desa Beriri Jarak

Desa Beriri Jarak luasnya adalah 9,37 km² (6,91%) dari luas Wanasaba. Desa Beriri Jarak terbagi menjadi 9 dusun dengan pusat pemerintahan berada di dusun Beriri Jarak. Jarak Desa ke ibukota kecamatan sekitar 7 km, sementara jarak ke ibukota kabupaten sekitar 19 km. Penduduk Desa Beriri Jarak saat ini



berjumlah 5278 jiwa, yang terdiri dari 2636 laki-laki dan 2642 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 1900 KK dan 1439 Rumah Tangga. Jumlah penduduk Desa Beriri Jarak 6,83% dari total penduduk Kecamatan Wanasaba. Hampir 35% total penduduk Desa Beriri Jarak menjadi pekerja migran. Saat ini, tercatat 1847 penduduk bekerja di luar negeri, yang terdiri dari 1407 laki-laki dan 440 perempuan.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 25,50)

Untuk mencapai SDGs Tujuan-1 ini, program yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan BLT-DD dengan anggaran Rp424.800.000,- yang diberikan kepada 118 kelompok penerima manfaat. Keluarga miskin penerima bantuan sosial di Desa Beriri Jarak baru baru mencapai 7,2%, yakni 115 KK penerima PKH dan 73 KK penerima BPNT.

Untuk peserta Sistem Jaminan Sosian Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Saat ini, ada 1470 warga yang menerima KIS/BPJS. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk PMT Balita, kelas Ibu Hamil dan anggaran Posyandu Keluarga. Akses air bersih dan air minum semua rumah tangga telah tersedia di desa, sedangkan untuk ketersediaan jamban sehat baru mencapai 95%. Di Beriri Jarak masih tercatat 20 rumah tidak layak huni (RTLH). Ada 9 Posyandu Balita, 5 Posyandu Lansia, 5 Posyandu Remaja, dan Puskesmas pembantu di Beriri Jarak. Pada 2022, tercatat 1 persalinan yang tidak menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, ada 1 kasus kematian ibu yang melahirkan dan 2 kasus kematian bayi. Demikian juga dengan pendidikan, tercatat 15 anak yang putus sekolah. Dilihat dari sarana pendidikan yang ada, di desa ini tersedia cukup banyak sarana pendidikan. Keluarga miskin korban bencana angin kencang yang ditangani tahun 2022, ada 5 KK yang mengalami rumah dan kandang ayam yang roboh. Capaian SDGs Tujuan-1 di Desa Beriri Jarak mendapat skor 25,50.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 47,37)

Adanya Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-5. Untuk ini, ada 3 kebijakan di Desa Beriri Jarak yang dihasilkan, yaitu (1) SK Kepala Desa Beriri Jarak No. 145 tahun 2022 tentang Paralegal; (2) SK Kepala Desa Beriri Jarak No. 145/20/PEM/2018 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan (3) Peraturan Desa Beriri Jarak No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan



Perempuan dan Anak. Selain itu, ada SK tentang Kader Pembangunan Manusia dan SK tentang Kader Posyandu. Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut di desa setidaknya memastikan agar perempuan mendapatkan layanan yang tepat, informasi dan pendidikan terkait isu kesetaraan gender. Untuk penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan itu, pemerintah desa telah bekerjasama dengan Konsorsium Adara NTB.

Keberadaan paralegal dan Perdes PPA telah mendukung turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu penguatan kapasitas paralegal. Tahun 2022, tidak tercatat adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin di atas 19 tahun) dan kelahiran pada remaja (*age specific fertility rate/ASFR*), tercatat ada 38 kasus.

Untuk angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat, berdasarkan data tahun 2022, tercatat 15 anak yang putus sekolah. Mayoritas ijazah tertinggi

di desa adalah SD sederajat. Di Desa Beriri Jarak tersedia 3 PAUD, 4 TK, 4 SD sederajat, 2 SMP dan 2 SMA.

Jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya ada 2 orang dari 9 anggota BPD (22,2%). Di perangkat desa, dari 16 orang tidak ada perempuannya. Terkait partisipasi perempuan dalam Musdes dan Musrenbangdes, dari 50 peserta yang hadir hanya ada 10 perempuan (20%). Apa yang dilakukan Desa Beriri Jarak untuk capaian SDGs Tujuan-5 di catatan Kemendes mendapat skor 47,37.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 29,02)

Untuk mencapai indikator Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun, pemerintah desa melakukan sewa lahan garapan tanah pecatu. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan oleh BUMDes dari unit jasa, pertanian dan jual beli. Pada 2022, PAD Beriri Jarak mencapai Rp12.000.000,- (40%) dari ketentuan yang ada.

Berdasarkan data pemerintah desa saat ini, ada 1847 (35%) penduduknya yang bekerja di luar negeri, yang terdiri dari 1407 laki-laki dan 440 perempuan.

Sementara akses permodalan formal dan UMKM, kegiatan pemerintah desa adalah menyediakan permodalan kredit bank. Saat ini, di Beriri Jarak ada 10 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kopi, budidaya jamur dan kuliner. Di Beriri Jarak juga ada wisata alam, yakni di Gawar Gong.

8. Desa Pagutan

Desa Pagutan luasnya adalah 6.00 km² (11,91%) dari luas Batukliang. Jarak Desa Pagutan ke ibukota kecamatan sekitar 7 km, sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 18 km. Desa ini terbagi menjadi 65 RT, 65 RW, dan 91 Satuan Lingkuan Setempat (SLS). Berdasarkan data yang ada, penduduk Desa Pagutan berjumlah 11.570, yang terdiri dari 5.645 laki-laki dan 5.925 perempuan. Jumlah ini 10,41% dari total penduduk Kecamatan Batukliang,

dengan kepadatan 1566,83/km². Di Desa Pagutan ada 3.490 KK yang terdiri dari 2.820 KK laki-laki dan 670 KK perempuan. Dari 3.490 KK, ada 1.060 KK masuk kategori miskin.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 14,56)

Untuk mencapai SDGs Tujuan-1, pemerintah Desa Pagutan memberikan BLT Desa dan program Padat Karya Tunai Desa. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp716.400.000,- Ada 199 orang penerima manfaat BLT-DD yang masing-masing menerima Rp300.000,- (199 orang penerima manfaat BLT-DD itu merupakan keluarga miskin). Bantuan sosial lainnya yang diterima warga miskin adalah PKH dan BPNT. Untuk PKH, ada 561 penerima manfaat. Untuk PKH, jumlah yang diterima berbeda-beda tergantung jumlah anak yang ditanggung yang masih sekolah. Untuk BPNT, ada 499 penerima manfaat.

Untuk warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, pemerintah desa memberikan anggaran sebesar Rp31.197.600,- Penerima manfaat kegiatan ini adalah 21 perangkat desa dan kepala desa sendiri.

Pembangunan sumur BOR dan bantuan rumah layak huni, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp305.000.000,- Anggaran pembuatan 2 sumur BOR sebesar Rp110.000.000,- Alokasi untuk 5 unit rumah layak sebesar Rp75.000.000,- Alokasi pembangunan 2 gedung Posyandu Rp120.000.000,- Capaian SDGs Tujuan-1 berdasarkan dokumen Kemendes memperoleh skor 14,56.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 39,06)

Berdasarkan data tahun 2022, di Desa Pagutan tercatat 2 kasus perkawinan anak, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 1 kasus kekerasan terhadap anak. Masih terjadi kasus-kasus tersebut tentu menghambat capaian SDGs Tujuan-5 ini.

Untuk mendukung penurunan kasus itu, beberapa kebijakan dikeluarkan

oleh pemerintah desa, seperti (1) Peraturan Desa Pagutan No. 6 Tahun 2020 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan; (2) SK Kepala Desa Pagutan tentang Paralegal; (3) SK Kepala Desa Pagutan No. 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Berkarya; (4) SK Kepala Desa Pagutan No. 3 Tahun 2020 tentang Kader Pembangunan Manusia, dan (5) SK Kepala Desa Pagutan No. 4 Tahun 2021 tentang Kelompok Wanita Tani. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp12.500.000,- untuk pembuatan Perdes dan operasional KPM.

Untuk perempuan mendapatkan layanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, ada 2 kegiatan yang telah dilakukan yaitu senam untuk ibu hamil dan pengembangan Kelompok Wanita Tani. Untuk ini, desa mengalokasikan anggaran Rp56.190.000,- Kelompok Wanita Tani melakukan budidaya bibit anggur dan kripik talas.

Kesehatan reproduksi masih menjadi persoalan penting di desa ini, karena dari 19 persalinan pada 2022, ada 1 kasus persalinan yang tidak menggunakan fasilitas kesehatan. Selain itu, terjadi 1 kasus kematian ibu yang melahirkan dan 6 kasus kematian bayi.

Paralegal di Desa Pagutan mendukung pemerintah desa untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Beberapa kegiatan dilakukan pemerintah desa bekerjasama dengan Paralegal dan Konsorsium ADARA Nusa Tenggara Barat melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan yang dihadiri oleh perwakilan remaja dari masing-masing dusun. Selain itu, sosialisasi-sosialisasi serupa juga dilakukan kepada kelompok-kelompok remaja dan majelis taklim.

Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa. hanya ada 1 orang perempuan (11,1%) dari 9 anggota BPD. Di perangkat desa, hanya 2 perempuan (9,5%) dari 21 orang. Perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, ada 15 perwakilan kader setiap dusun, 1 Kader Pembangunan Manusia, 1 ketua Kader, 1 ketua PKK dan 1 bidan desa. Jadi, ada 19 perempuan hadir dalam forum Musdes dan Musrenbangdes di Desa Pagutan.

Terkait kelahiran remaja usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) mencapai 0% dan angka SMA/SMK/MA/ sederajat, pemerintah desa tidak memiliki informasi. Skor tinggi pada usia kawin perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 19 tahun, yaitu 94,74. Pada 2022, di Desa Pagutan tercatat 2 kasus perkawinan anak.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 16,40)

Upaya pemerintah desa untuk mencapai SDGs Tujuan-8 ini ialah kegiatan “Mancing Mania” dan sarana wisata kolam renang dan Embung Sangkawati. Dengan ini, diharapkan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp325.000.000,- Tercatat PAD Pagutan tahun 2022 mencapai Rp15.000.000,-

Untuk permodalan formal dan UMKM, pemerintah desa memberi bantuan 15 gerobak untuk pelaku UMKM perempuan. Pemberian barang ini untuk penjual kue terang bulan dan pelatihan keterampilan untuk pelaku UMKM. Untuk itu, anggaran yang diberikan pemerintah desa sebesar Rp93.200.000,- Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa, tahun 2022 desa telah mengalokasikan anggaran Rp37.000.000,- Ada 78 orang yang terlibat dalam PKTD ini, yang terdiri dari 48 laki-laki dan 30 perempuan. Dalam situs Kemendes, Tujuan-8 Desa Pagutan memperoleh skor 16,40.

9. Desa Pemepek

Desa Pemepek memiliki luas 18,97 km² (35,94%) dari luas Pringgarata. Jarak Desa Pemepek ke ibukota kecamatan sekitar 3 km, dan ke ibukota kabupaten sekitar 21 km. Desa Pemepek terbagi menjadi 16 Dusun dengan jumlah penduduk 8253, yang terbagi 4136 laki-laki dan 4117 perempuan. Jumlah penduduk di Desa Pemepek 11,11% dari total penduduk Pringgarata. Penduduk Desa Pemepek terdiri atas 2946 KK, dimana 1292 KK masuk kategori miskin dan 732 KK masuk kategori miskin ekstrim.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 42,17)

Dalam situs Kementerian Desa, untuk SDGs Tujuan-1, di Pemepek jumlah penerima manfaatnya ada 1426 jiwa. Untuk ini, pemerintah desa memberikan BLT-DD. Juga pembentukan Kelompok Perempuan Mandiri dan memaksimalkan Padat Karya Tunai (PKTD). Untuk kegiatan tersebut, desa mengalokasikan anggaran Rp709.200.000,- Terkait BLT-DD diberikan kepada 197 penerima manfaat yang masing-masing menerima Rp300.000,- (dibagikan 3 bulan sekali). Pemerintah desa memverifikasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan. Saat ini, 3422 warga desa sebagai peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ada 2.024 warga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah desa mengusulkan agar masyarakat miskin masuk DTKS secara berkala /bertahap. Untuk mencapai indikator keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, maka pemerintah desa membangun sarana prasarana kesehatan, pendidikan, air bersih dan rumah layak huni. Salah satu kegiatan tersebut ialah membangun sumur Bor dengan anggaran Rp118.459.000,-



b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 47,37)

Terkait Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, beberapa kebijakan dilahirkan desa ini, yaitu (1) Surat Keputusan Kepala Desa Pemepek No. 13 Tahun 2022 tentang Tim Pengerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (TP PKK); (2) Surat Keputusan Kepala Desa Pemepek No. 4 Tahun 2022 tentang SK Posyandu Keluarga dan (3) Peraturan Desa Pemepek No. 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk PKK, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp10.750.000,- Untuk kegiatan Posyandu, disediakan anggaran desa sebesar Rp230.400.000,- Anggaran tersebut dialokasikan untuk honorarium kader Posyandu sekaligus layanan Posyandu keluarga.

Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan lengkapnya, pemerintah desa melakukan peningkatan kapasitas kelompok paralegal. Kegiatan ini bekerjasama dengan Konsorsium Adara Nusa Tenggara Barat. Juga dibentuk Kelompok paralegal dan Kelompok Laki-Laki Baru (KLLB) serta optimalisasi peran dan fungsi kelompok tersebut. Kegiatan pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencegahan perkawinan anak, konseling keluarga dan pengurusan akta perceraian, juga dilaksanakan. Ada 17 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil ditangani.

Terkait usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), pemerintah desa telah melakukan sosialisasi Perda Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Selain itu, mensosialisasikan Peraturan Desa Pemepek No. 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana peraturan tersebut berguna untuk mencegah perkawinan anak. Kegiatan ini dilakukan di sekolah-sekolah dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Sosialisasi ini bekerjasama dengan sekolah, pondok pesantren, mahasiswa, NGO, dan kelompok peduli perempuan dan anak lainnya. Sementara itu, jumlah anak yang melahirkan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) masih menjadi masalah,

karena berdasarkan data tahun 2022, ada 25 orang remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan. Berkaitan dengan pencapaian angka partisipasi SMA/SMK/MA/ sederajat, pada 2022 tercatat 102 anak putus sekolah. Untuk ini, pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa membantu pencapaian indikator ini. Di Desa Pemepek ada 4 PAUD, 4 TK, 9 SD sederajat, 4 SMP dan 3 SMA.

Untuk jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saat ini dari 9 anggota BPD hanya ada 1 perempuan (11,1%). Untuk perangkat desa, dari 23 orang hanya ada 1 orang perempuan (4,3%). Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, pemerintah desa berusaha mengundang semua kelompok perempuan yang ada, seperti PKK, Kader Posyandu dan Anggota Kelompok Wanita Tani. Dari 75 peserta Musdes dan Musrenbangdes, hanya 33 perempuan yang hadir (44%).

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 27,34)

Pendapatan Asli Desa (PAD) rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan capaian SDGs Tujuan-8. Pemerintah Desa Pemepek mengoptimalkan pendapatan desa melalui BUMDes dengan menambah jenis usaha, yaitu mengelola wisata alam. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp100.000.000,- Berdasarkan data, PADes tahun 2022 baru Rp10.664.000,-

Untuk pekerja sektor formal, pemerintah desa menyiapkan tenaga siap kerja melalui pelatihan keterampilan. Desa menjalin kerjasama dengan balai latihan kerja dan dinas terkait untuk melaksanakan pelatihan serta sertifikasi tukang dan bidang keahlian lainnya. Selain itu, pemerintah desa menyiapkan lapangan kerja dengan mendorong investasi masuk desa. Pemerintah desa melakukan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk menyerap >50% pengangguran di desa.

Memfasilitasi masyarakat dan UMKM dalam pemenuhan syarat mendapatkan

akses permodalan, hal itu telah menjadi kegiatan pemerintah desa. Ini tentu mendukung akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM di desa (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa).

B. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk provinsi Nusa Tenggara Timur, upaya memotret capaian SDGs di tingkat desa dilaksanakan di 12 desa, yaitu Ajaobaki, Biloto, Kuanek, Nekbaun, Niukbaun, Oelomin, Tunfeu, Oe'Ekam, Oesena, Oelet, Maubesi, Oebelo. Keduabelas desa ini terletak di 10 kecamatan dan di 3 kabupaten (Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang).

1. Desa Ajaobaki

Desa Ajaobaki memiliki Luas 5,44 km² atau 2,61% dari luas kecamatan Mollo Utara, dengan pusat pemerintahan berada di Sikam. Desa ini memiliki ketinggian 983 mdpl. Jarak Desa Ajaobaki ke kecamatan Mollo Utara sekitar 5



km, sementara jarak Ajaobaki ke kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar 25 km. Desa Ajaobaki terdiri dari 4 dusun, 8 RW dan 16 RT.

Penduduk Desa Ajaobaki saat ini berjumlah 2176 jiwa, yang terdiri dari 1207 laki-laki dan 1069 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 511 KK, dimana 170 KK masuk dalam kategori miskin, dan 148 KK masuk dalam kategori sangat miskin (ekstrim). Jumlah penduduk Desa Ajaobaki 8,22% dari total penduduk di Kecamatan Mollo Utara dengan kepadatan penduduk 362/km² dan rata-rata anggota rumah tangga per KK adalah 4,7 jiwa.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 38,26)

Untuk mencapai SDGs Tujuan-1, pemerintah desa telah memberikan bantuan ternak bagi keluarga yang kurang mampu, bantuan terhadap kelompok budidaya ikan air tawar (lele) dan pakan untuk 5 kelompok, bantuan jagung seluas 5 ha, bantuan pupuk, bantuan 3 unit *hand tractor* dan *viber*. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp100.000.000,- di bidang pemberdayaan. Selain itu, pemerintah desa juga menyerahkan bantuan sapi kepada 50 Kepala Keluarga kurang mampu.

Untuk penurunan kemiskinan, ada 56 KK sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa, dan 52 KK menerima program keluarga harapan (PKH). Selain itu, ada 75 KK menerima bantuan subsidi pupuk dan 17 KK menerima bantuan listrik.

Dilihat di situs Kemendes, ada 409 keluarga tercatat sebagai penerima berbagai bantuan sosial dana desa, PKH, BST, Banpres, Bantuan UMKM, Bantuan Pekerja, Bantuan Pendidikan dan lainnya. Pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran kegiatan untuk Posyandu Lansia dan pemberian PMT Khusus untuk *stunting* kepada 21 anak.

Kesehatan balita menjadi salah satu persoalan saat ini yang masih terjadi di Desa Ajaobaki. Tahun 2022, tercatat 3 kasus kematian bayi dan 2 kasus persalinan yang tidak memakai fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data tahun 2022, ada 8 kasus penderita kekurangan gizi. Sarana kesehatan

desa masih menjadi persoalan saat ini, karena hanya ada 4 Posyandu Balita dan 1 Posbindu, tidak ada Puskesmas, ada 1 bidan desa dan 1 sarana kesehatan di luar desa yang jaraknya kurang dari 6 km. Untuk akses air bersih, di Desa Ajaobaki ada 446 KK yang memiliki akses air minum layak, sedangkan untuk rumah tidak layak huni ada 25 KK.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 53,18)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan merupakan capaian SDGs Tujuan-5. Untuk ini, 2 Perdes yang sudah dikeluarkan Desa Ajaobaki, yaitu (1) Peraturan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan (2) Peraturan Desa Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Selain 2 Perdes tersebut, ada 6 SK yang dihasilkan yaitu (1) SK tentang Paralegal, (2) SK tentang Kader Posyandu, (3) SK tentang Kader Pembangunan Manusia, (4) SK tentang PKK, (5) SK tentang Kelompok JPMP, dan (6) SK tentang KWT.



Keberadaan kebijakan tersebut berkontribusi kepada makin baiknya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Keberadaan paralegal yang dibentuk melalui SK yang ada itu serta adanya alokasi anggaran desa kian membantu penanganan tersebut. Desa juga menyediakan posko, pendampingan dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah sosialisasi melalui gereja ataupun rapat desa. Ada kerjasama dengan lembaga adat di desa, yaitu kebijakan ketika laki-laki menikah harus memiliki kebun dan perempuannya dapat menenun kain. Pembinaan bagi calon pengantin dilakukan baik oleh gereja maupun pemerintah desa. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan akan mencegah jumlah anak yang melahirkan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR). Agar tidak ada remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan, maka sanksi adat yang dilakukan berupa denda bagi pelaku.

Untuk angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA/ sederajat), pemerintah desa melakukan sosialisasi atau mendorong para orangtua untuk menyekolahkan anak mereka hingga pendidikan menengah (SMA sederajat). Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan turut membantu hal itu. Desa Ajaobaki memiliki 2 unit PAUD, 1 unit TK, 3 unit SD dan sederajat, 1 unit SMP dan 1 unit SMA.

Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ajaobaki baru mencapai 20% (1 orang perempuan dari 5 anggota BPD), sedangkan di perangkat desa mencapai 33,3% (3 perempuan dari 9 orang). Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes hanya ada 28 perempuan dari 68 peserta yang hadir .

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 24,18)

Pendapatan Asli Desa Ajaobaki rata-rata di atas Rp 30 juta per tahun merupakan target SDGs desa Tujuan-8. Tahun 2022, pemerintah desa tidak memiliki data

PAD yang jelas. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk pendukung pencapaian tersebut.

Untuk pekerja sektor formal minimal 51%, pemerintah desa belum memiliki dokumen dan belum berhasil mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan catatan desa yang ada, pekerja formal baru mencapai 20% (guru dan pegawai).

Berdasarkan data di Kementrian Desa, tercatat mayoritas penduduk desa Ajaobaki adalah petani pemilik lahan (68%), TKI/buruh migran (13,09%), PNS dan Guru (8,91%). Ada 21 orang baru selesai sekolah yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerjasama antara pemerintah desa dengan Dinas Perindustrian, bank, dan lainnya.

Akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM di Ajaobaki melalui BRI dan Bank NTT. Selain itu, ada 2 koperasi yang bergerak di desa, seperti koperasi TLM dan Sami Jaya. Untuk ini, pemerintah desa bekerjasama dengan Bank NTT melakukan sosialisasi dan donasi Rp 250.000.000,- untuk UMKM Suka Maju (desa binaan Bank NTT). Di samping itu, pemerintah desa juga bekerjasama dengan koperasi Sami Jaya dan Bank BRI terkait penggelontoran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di situs Kemendes, SDGs Tujuan-8 Desa Ajaobaki mendapatkan skor 14,18.

2. Desa Biloto

Desa Biloto luasnya 39,05 km² atau 26,53 persen dari keseluruhan Kecamatan Mollo Selatan. Pusat Pemerintahan berada di Biloto dengan jarak ke ibukota kecamatan sekitar 4 km dan ke ibu kota kabupaten sekitar 5 km. Desa Biloto terbagi menjadi 4 Dusun, 10 RW dan 21 RT. Penduduk Desa Biloto saat ini berjumlah 2059 jiwa yang terdiri dari 1041 laki-laki dan 1018 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 523 KK, terdiri dari 439 KK laki-laki dan 84 KK Perempuan. Jumlah penduduk Desa Biloto merupakan 10,96% dari total jumlah penduduk Kecamatan Mollo Selatan. Sementara rata-rata anggota keluarga per KK berjumlah 4 jiwa.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 46,74)

Untuk mencapai SDGs Tujuan-1, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan bantuan ayam petelur, ikan lele dan sayur-mayur kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, ada bantuan bibit jagung yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menunjang program ketahanan pangan (TJPS). Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp219.783.000,- dari alokasi Bidang Pemberdayaan. Dari program itu, ada 4 kelompok yang terdiri atas 20 orang per kelompok yang tersebar di 4 dusun sebagai penerima manfaat.

Pemerintah desa memberikan BLT Desa, BST, PKH, dan BLT BBM. BLT DD termuat dalam APB Desa, sedangkan BST, PKH, dan BLT BBM merupakan bantuan Pemerintah Pusat yang anggarannya dari APBN. BLT DD alokasi anggarannya 40% dari dana desa. Ada 111 Kepala Keluarga penerima BLT DD; 185 KK penerima PKH, 219 penerima BLT BBM, dan 86 KK penerima BST.

Untuk keluarga miskin yang mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak dan melalui pemberian PMT bagi ibu hamil, anak-anak *stunting*, lansia, anak gizi buruk dan kurang, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran Rp87.195.200,- Penerima manfaat kegiatan ini adalah 24 orang ibu hamil, 7 anak *stunting*, 21 anak gizi kurang, dan 9 anak gizi buruk. Akses air bersih di Desa Biloto tidak mengalami masalah, karena semua rumah tangga memiliki akses air bersih yang baik. Masih ada 23 rumah tidak layak huni (RTLH).

Terkait capaian SDGs Tujuan-1, dengan perolehan skor 46,74, penurunan angka kemiskinan pada 1768 jiwa penduduk desa. Untuk kemiskinan ekstrim, desa mendapat skor 8,84 yang mencakup 299 jiwa. Peserta SJSN bidang kesehatan mencapai skor 30,43 dengan jumlah 7 jiwa. Penerima bantuan sosial skor 80,00 dengan jumlah 4 keluarga. Orang miskin mendapat layanan kesehatan mencapai skor 16,67 dengan jumlah 1 jiwa. Orang miskin yang mendapat pendidikan SMA dengan jumlah 1 jiwa. Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN dan nonPLN) mencapai skor 100 dengan 5 keluarga. Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai skor 60,00 dengan 3 keluarga. Keluarga miskin dengan

hunian layak mencapai skor 100,00 dengan 5 keluarga. Keluarga miskin dengan hunian layak mencapai skor 100,00 dengan 5 keluarga.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 88,11)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan adalah indikasi capaian SDGs Tujuan-5 ini. Untuk mendukung ini, Desa Biloto mengeluarkan SK tentang Paralegal. Mandat SK ini ialah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di desa. Pemerintah desa belum memiliki anggaran khusus untuk paralegal.

SK tentang Paralegal ini berkontribusi terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama) dan pencegahan anak yang melahirkan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*), pemerintah desa bekerjasama dengan BKKBN dan Puskesmas desa melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Dengan kegiatan itu, tahun 2022 tidak ada kasus perkawinan anak maupun kelahiran usia 15-19 tahun.

Untuk angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat, pemerintah desa membina masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pemerintah desa belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan ini. Dengan upaya ini, tidak ditemukan anak yang putus sekolah serta banyak dari mereka yang menyelesaikan pendidikan SMA sederajat. Apa yang dikerjakan pemerintah desa untuk capaian SDGs Tujuan-5, di situs Kemendes Desa Biloto mendapat skor 88,11.

c. Tujuan-8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 26,81)

Pendapatan Asli Desa (PAD) rata-rata di atas Rp 30 juta per tahun merupakan salah satu capaian SDGs Tujuan-8. Pekerja sektor formal maksimal 51%, ada sebagai petani/pekebun; dan sisanya $\pm$ 5% bekerja sebagai guru, PNS, TNI,

Polri dan pegawai swasta. Berdasarkan situs Kemendes, mayoritas penduduk Desa Biloto merupakan petani pemilik lahan mencapai 76,69%; ada 7,47% buruh migran (TKI); guru 3,74% dan PNS 4,80%. Untuk penurunan angka pengangguran, pemerintah desa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengadakan latihan pertukangan, perbengkelan, menjahit dan menenun. Pemerintah desa mengupayakan agar anak-anak yang baru selesai sekolah mendapatkan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, bank, dan lainnya.

Padat Karya Tunai Desa menyerap >50% pengangguran di desa melalui kegiatan rehabilitasi jaringan pipa yang dilakukan oleh desa. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp10.690.500,- melalui aktivitas itu. Dengan ini, masyarakat tidak sulit memperoleh air bersih. PKTD ini mampu menyerap 21 tenaga kerja di desa (13 laki-laki dan 8 perempuan). Untuk akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM, pemerintah desa bekerjasama dengan BRI melakukan sosialisasi KUR. Desa membantu pembentukan kelompok, penyelesaian administrasi dan keterangan usaha. Di Biloto saat ini terdapat 2 Bank dan 5 koperasi, 17 UMKM dan 24 pelaku usaha.

3. Desa Kuanek

Desa Kuanek merupakan 1 dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Kuanek memiliki luas 4,35 km² atau 7,04% dari luas kecamatan Bikomi Tengah. Jarak desa Kuanek ke ibukota kecamatan sekitar 8 km, sedangkan jarak ke ibukota kabupaten sekitar 10 km. Desa ini terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RT dan 4 RW.

Penduduk Desa Kuanek saat ini berjumlah 555 jiwa yang terdiri dari 277 laki-laki dan 278 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 161 KK. Jumlah penduduk Desa Kuanek merupakan 6,91% dari total penduduk Kecamatan Bikomi Tengah. Terdapat 18 orang laki-laki dan 28 orang perempuan lanjut usia yang miskin.

- a. Tujuan-1** (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 5,47)

Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Kuanek dalam rangka menurunkan kemiskinan adalah Memberikan bantuan ternak babi. Pemerintah Desa melalui bidang pemberdayaan mengalokasikan anggaran Rp100.000.000,- untuk kegiatan ini. Penerima manfaat program ini sebanyak 85 KK yang miskin.

Beberapa jenis bantuan yang diterima warga desa antara lain BLT Desa, BST, PKH, BPNT. Untuk BLT desa, ada 98 KK penerima manfaat. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp349.200.000,- (40% dari total DD) untuk hal ini. Untuk penerima PKH, ada 28 KK dan BPNT 22 KK yang mendapatkan. Untuk warga desa peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, ada 95 orang penerima BPJS nonPBI/Mandiri serta 2 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa melalui Posyandu Lansia, pemberian makanan tambahan untuk bayi *stunting*, dan lain-lain, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp34.000.000,- dari dana desa (untuk PMT), selain dari anggaran Dinas Kesehatan. Tahun 2022, tercatat satu kasus kematian ibu yang melahirkan dan satu kasus angka kematian bayi. Minimnya sarana kesehatan desa menjadi pemicu munculnya kasus tersebut. Saat ini, sarana kesehatan yang ada di desa hanya satu Puskesmas dan satu Posyandu. Masih ada 21 rumah tidak layak huni (RTLH) di desa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 97,14)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan merupakan capaian SDGs Tujuan-5 ini. Untuk ini, Desa Kuanek melahirkan SK tentang Paralegal. Pemerintah desa mengalokasikan Rp1.800.000,- sebagai anggaran pendampingan kasus, sedangkan insentif untuk paralegal diambil anggarannya dari Dinas P3A dan P2TP2A.

SK tersebut mendukung keberadaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Untuk kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,

anggarannya bersumber dari Dinas P3A sebesar Rp7.600.000,- Demikian pula pencanangan DRPPA dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Pemerintah desa memberi sosialisasi kepada masyarakat umum melalui musyawarah desa di aula kantor desa dan gereja serta baliho, stiker, Tugu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta diskusi-diskusi tematik. Jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok paralegal akan mendampingi korban baik di desa maupun desa tetangga. Masyarakat Desa Kuanek mengetahui tempat/rumah untuk pengaduan kasus. Tahun 2022, tercatat 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan satu kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani.

Untuk mencapai usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), pemerintah desa melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan gereja atau rapat di desa. Pemerintah desa membangun kerjasama pula dengan lembaga adat. Tahun 2022, tidak tercatat adanya perkawinan anak, namun ada satu kasus kelahiran oleh remaja usia 15-19 tahun. Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, meskipun sebagian besar anak hanya lulus SMP sederajat. Dalam dokumen SDGs di Kemendes, tercatat 148 orang (27,92%) yang tidak sekolah atau tidak samat SD, dan 40,75% penduduk yang memiliki ijazah SD dan sederajat. Di Desa Kuanek hanya ada 1 unit PAUD dan SD.

Partisipasi perempuan di BPD di Desa Kuanek hanya ada 2 orang perempuan (40%) dari 5 anggota BPD. Ketua BPD di pegang oleh seorang perempuan. Dengan kondisi ini, perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 30% telah terpenuhi. Demikian pula jumlah perempuan di perangkat desa, ada 6 orang perempuan (54,5%) dari 11 perangkat desa. Dari 6 orang perempuan itu, ada 4 orang menjabat sebagai kaur/kasie dan 2 orang sebagai kepala dusun. Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes sudah lebih baik, karena dominasi kaum perempuan. Pemerintah desa juga melakukan sosialisasi dan membuat SK untuk kader Posyandu dan Lansia. Terdapat kader subPPKBD yang alokasi anggarannya bersumber dari BKKBN. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran transportasi untuk kader Posyandu Rp150.000,-/

orang/bulan. Untuk capaian SDGs Tujuan-5 ini terlihat di situs Kemendes, Desa Kuanek mencapai skor 97,14.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 40,73)

Untuk mencapai Pendapatan Asli Desa (PAD) rata-rata di atas Rp 30 juta per tahun sebagai indikator SDGs Tujuan-8, desa tidak memiliki aktivitas yang khusus untuk kebutuhan ini. Justru data yang ada di situs Kemendes menunjukkan mayoritas penduduk Desa Kuanek adalah petani pemilik lahan, dan hanya 3,39% sebagai PNS.

Untuk Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa, pemerintah desa melakukan pembangunan wc sehat dengan mengalokasikan anggaran Rp180.000.000,- untuk 15 unit. Dalam program ini, biaya HOK tukang di tanggung oleh penerima manfaat sendiri.

4. Desa Nekbaun

Desa Nekbaun luasnya adalah 16,23 km² (7,91%) dari luas Amarasi Barat, yang sebagian besar hamparan dengan kemiringan 15-25 derajat dan ketinggian 328,50 mdpl. Ibukota Desa Nekbaun ada di Riumata. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Nekbaun masuk dalam kategori desa berkembang (skor 0,5997). Jarak Desa Nekbaun ke ibukota kecamatan 3 km, sementara ke ibukota kabupaten sekitar 64 km. Desa Nekbaun terbagi menjadi 4 dusun, 8 RW dan 17 RT, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk Desa Nekbaun berjumlah 1795 jiwa yang terdiri dari 825 laki-laki dan 970 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 460 KK, terdiri dari 380 KK laki-laki dan 80 KK perempuan. Sebanyak 430 KK terdiri dari 410 KK laki-laki dan 20 KK perempuan masuk dalam kategori KK miskin, sementara yang tidak miskin berjumlah 30 KK, yang terdiri dari 29 KK laki-laki dan 1 KK perempuan. Jumlah penduduk Desa Nekbaun 10,53% dari total jumlah penduduk Kecamatan Amarasi Barat. Rata-rata anggota keluarga per KK berjumlah 4 orang.

a. **Tujuan-1** (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor 7,15)

Untuk mengurangi kemiskinan di desa, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberi bantuan ternak sapi untuk keluarga yang kurang mampu. Penerima manfaat program ini 25 KK miskin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,-. Kegiatan lainnya yang dilakukan pemerintah desa ialah pemberian BLT Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk BLT Desa, alokasinya memakai 40% dari DD, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 164 KK. Penerima PKH sebanyak 140 KK dan 40 KK penerima BPNT. Jumlah warga desa yang menjadi peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan saat ini kurang lebih 1000 warga. Dalam dokumen SDGs, di Desa Nekbaun ada 174 keluarga penerima berbagai bantuan sosial.

Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah desa sebesar Rp10.000.000,- Hasil PMT khusus *stunting* adalah angka *stunting* menurun dari 78 orang



anak menjadi 40 orang anak. Sarana Kesehatan di Desa Nekbaun saat ini terdapat 5 Posyandu Balita dan 2 Posyandu Lansia. Sementara itu, hanya ada satu puskesmas pembantu. Akses air bersih di Nekbaun tidak ada masalah, karena semua KK memiliki air minum yang baik. Namun demikian, masih ada 25 rumah tidak layak huni (RTLH). Keluarga miskin korban bencana yang ditangani tahun 2022 ada 16 KK akibat Siklon Seroja, yang bekerjasama dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 51,52)

Isu perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan besar yang ditemukan di Desa Nekbaun. Data tahun 2022, tercatat tiga kasus perkawinan anak, satu kasus kekerasan terhadap perempuan, dan satu kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mencegah kasus-kasus itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah mengeluarkan peraturan desa yang mendukung pemberdayaan perempuan. Di Desa Nekbaun saat ini ada 3 peraturan desa yang dikeluarkan terkait hal tersebut, yakni (1) SK tentang Paralegal, (2) SK tentang PKK dan (3) SK tentang KWT. Dengan SK tentang Paralegal, kasus-kasus KDRT di desa bisa tertangani dengan baik. Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemerintah desa bekerjasama dengan KTAS NTT melalui program I-WIL membentuk paralegal dan memperkuatnya melalui SK tentang Paralegal, menyediakan posko, pendampingan dan pencatatan kasus. Pemerintah desa belum menganggarkan untuk kegiatan ini, karena masih ada kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan adanya paralegal, hal ini turut menyumbang pencapaian layanan terhadap perempuan secara lebih komprehensif. Tahun 2022, satu kasus kekerasan berhasil ditangani. Dengan adanya kelompok paralegal, masyarakat mulai takut melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui gereja atau rapat, namun tahun 2022, tercatat 3 kasus perkawinan anak. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan berdampak terhadap indikator anak yang melahirkan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) makin menurun.

Untuk mendukung angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA sederajat, pemerintah desa mendekatkan sarana pendidikan, seperti PAUD,TK, SD, SMP dan SMK Negeri kepada masyarakat. Saat ini, di Desa Nekbaun terdapat 3 PAUD, 1 TK, 2 SD dan Sederajat, 1 SMP dan 1 SMA/SMK. Berdasarkan data, ada 3 anak yang putus sekolah, sedangkan ijazah tertinggi paling banyak dimiliki di desa ini adalah SD sederajat.

Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa minimal 30% menjadi indikator yang belum bisa dicapai Desa Nekbaun. Saat ini, hanya satu orang perempuan (11,1%) dari 9 anggota BPD. Jumlah perempuan di perangkat desa juga belum memadai, karena 6 orang perangkat desa yang ada, semuanya laki-laki. Hanya ada dua orang perempuan di tingkat RT dan RW.

Untuk partisipasi perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, pemerintah desa memberikan undangan kepada kelompok perempuan, tokoh perempuan dan kader posyandu. Dari 125 peserta Musdes dan Musrenbangdes, hanya 50 orang perempuan (40%) yang hadir. Alokasi anggaran transportasi untuk kader Posyandu yang tersedia dari BKKBN hanya Rp125.000,-/bulan/orang.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 20,57)

Untuk mencapai indikator Pendapatan Asli Desa rata-rata diatas Rp 30 juta per tahun, kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa ialah memberikan bantuan 40 ekor sapi kepada keluarga miskin. Untuk ini, desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000,- Desa Nekbaun mencapai skor 9,15 dengan PAD yang diperoleh sebesar Rp2.835.871,-

Pemerintah desa memberikan usulan kepada pemerintah Kabupaten dan Propinsi untuk penambahan 2 orang guru di SMK dan 3 orang di SMP. Dalam dokumen SDGs, indikator sektor ini mencapai skor 23,44 (60 jiwa). Mayoritas penduduk desa Nekbaun berprofesi sebagai petani pemilik lahan. Yang berprofesi sebagai guru hanya 7,51% dan PNS 5,90%.

Pemerintah desa memberikan pelatihan perbengkelan kepada warga desa. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp15.000.000,- Saat ini, beberapa peserta pelatihan sudah berhasil membuka bengkel sendiri.

Untuk akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro), dukungan pemerintah desa dilakukan melalui beberapa hal, seperti sosialisasi KUR dan surat keterangan usaha. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp250.000.000,- dan pelaku UMKM mendapat bantuan modal usaha Rp5.000.000,- Saat ini, di Nekbaun ada 11 UMKM, dimana 5 pelakunya laki-laki dan 6 orang perempuan.

Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah pembuatan drainase atau saluran irigasi yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp115.000.000,- yang menyerap 100 orang tenaga kerja desa. Untuk kontribusi wisata mencapai 8% pendapatan desa, maka yang dilakukan pemerintah desa adalah membangun wisata bahari atau pinggiran pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,-

5. Desa Niukbaun

Desa Niukbaun luasnya adalah 12.00 km² (5,85%) dari luas kecamatan Amarasi Barat, dengan lokasi sebagian besar hamparan, kemiringan 15-25 derajat dan ketinggian sekitar 481,8 mdpl. Ibu kota Desa Niukbaun ada di Manera. Jarak Desa Niukbaun ke ibu kota kecamatan sekitar 1 km, sementara jarak ke ibukota kabupaten sekitar 60 km.

Desa Niukbaun terbagi menjadi 4 dusun, 6 RW dan 12 RT, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk Desa Niukbaun berjumlah 1504 jiwa yang terdiri dari 756 laki-laki dan 748 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 397 KK. Ada sebanyak 100 KK yang miskin, 74 KK sangat miskin (ekstrim) dan 223 KK tidak miskin. Jumlah penduduk Desa Niukbaun 8,95% dari total jumlah penduduk Kecamatan Amarasi Barat, sementara rata-rata anggota keluarga per KK berjumlah 4 orang.

- a. **Tujuan-1** (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 26,05)



Untuk mencapai kemiskinan desa yang rendah, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberikan bantuan ternak babi untuk keluarga kurang mampu. Penerima manfaat program ini adalah 25 KK miskin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp37.500.000,-

Untuk keluarga miskin yang menerima bantuan sosial, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan BLT Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk BLT Desa, alokasi anggarannya menggunakan 40% dari total DD, dengan jumlah penerima sejumlah 100 KK. Untuk penerima PKH berjumlah 76 KK dan penerima BPNT berjumlah 24 KK. Warga desa peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan (PBI dan non PBI) dan Ketenagakerjaan mencapai 57 KK. Pemerintah desa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk mengetahui data-data penerima bantuan. Dalam dokumen SDGs, saat ini ada 175 keluarga sebagai penerima berbagai bantuan sosial. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak ialah melalui kegiatan Posyandu Lansia, PMT *stunting*, bantuan air dari BPBD, Pamsimas, dan lainnya. Di Desa Niukbaun ada balita 128, dimana 6 anak mengalami *stunting* dan 8 ibu hamil. Terkait sarana kesehatan, di Niukbaun

ada 5 Posyandu Balita, 5 Posyandu Lansia dan 1 Posyandu Remaja serta satu puskesmas pembantu. Masih ada 5 rumah tidak layak huni (RTLH).

Tahun 2022, tercatat 124 KK menjadi korban bencana Siklon Seroja dan sudah tertangani pemerintah desa. Untuk ini, pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Skor kemiskinan desa mencapai 26,05 dengan volume 1178 jiwa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 49,21)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan adalah capaian SDGs Tujuan-5. Untuk ini, di Desa Niukbaun ada SK Kepala Desa tentang Paralegal. Desa juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.000.000,- untuk operasional paralegal. Paralegal mendukung capaian indikator kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan makin menurun. Tahun 2022, tercatat 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 1 kasus kekerasan terhadap anak. Ketiga kasus tersebut berhasil ditangani paralegal. Keberadaan paralegal menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan, informasi, dan pendidikan kesehatan reproduksi dilakukan melalui Posyandu Remaja dengan memberikan informasi-informasi yang relevan. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp250.000,- per kegiatan. Terkait usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama), pemerintah desa melakukan sosialisasi di gereja atau rapat desa. Kerjasama dengan institusi adat dimana ada aturan ketika laki-laki menikah harus memiliki kebun dan perempuan bisa menenun kain. Dengan ini, sebagian besar perkawinan dilakukan di atas usia 21 tahun. Pendewasaan usia perkawinan berdampak terhadap capaian indikator anak yang melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) yang makin menurun. Tahun 2022, tidak ada remaja usia 15-19 yang melahirkan.

Untuk mendukung angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA sederajat, pemerintah desa melakukan kerjasama dengan SMA/SMK yang ada. Angka putus sekolah di Niukbaun saat ini ada 98 anak putus sekolah, terdiri dari 54

laki-laki dan 44 anak perempuan. Yang memiliki ijazah tertinggi SMA sederajat cukup banyak di desa ini. Sarana pendidikan di Niukbaun ada 2 PAUD, 1 TK, 1 SD dan Sederajat, 1 SMP dan 2 SMA/SMK.

Jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal 30% menjadi indikator yang belum bisa dicapai Desa Niukbaun. Saat ini, baru ada 2 perempuan (22,2%) dari 9 anggota BPD. Perempuan di perangkat desa minimal 30% juga tidak tercapai, karena hanya ada 2 perempuan (18,1%) dari 11 orang. Pemerintah desa mendorong perempuan lebih aktif di pencalonan BPD, Perangkat Desa atau lainnya.

Keterlibatan perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes dalam forum ini hanya 48 orang perempuan (39,6%) dari 121 peserta. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp10.000.000,-/tahun. Alokasi anggaran transportasi untuk kader subPPKBD dari BKKBN Rp 150.000,-/bulan/orang.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 21,26)

Untuk mencapai indikator Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah pengadaan 30 ekor sapi yang diberikan kepada keluarga miskin. Selain itu, ada pengembangan PAM Desa serta permodalan untuk BUMDes. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp180.000.000,- Pengadaan sapi telah menyumbang PAD sebesar Rp100 juta. Capaian SDGs ini, Desa Niukbaun mencapai skor 20,13 dengan PAD Rp6.240.809,- Padat Karya Tunai Desa yang menyerap >50% pengangguran di desa yang dilakukan adalah pembukaan jalan baru dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,- yang menyerap 70 orang tenaga kerja.

6. Desa Oelomin

Desa Oelomin memiliki luas 2,20 km² (1,80%) dari luas Nekamese. Jarak desa Oelomin ke ibukota kecamatan sekitar 7 km, sedangkan jarak ke ibukota

kabupaten sekitar 48 km. Desa Oelomin berupa hamparan dengan kemiringan sedang dan ketinggian 341,00 mdpl. Desa Oelomin terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW dan 16 RT dengan pusat pemerintahan desa berada di Oelomin. Penduduk desa Oelomin saat ini berjumlah 1746 jiwa yang terdiri dari 876 laki-laki dan 879 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 413 KK, terdiri dari 338 KK laki-laki dan 75 KK Perempuan. Dari jumlah KK tersebut, sebanyak 347 KK laki-laki dan 41 KK perempuan masuk dalam kategori miskin. Jumlah penduduk Desa Oelomin adalah 15,38% dari total penduduk Nekamese. Sementara itu, rata-rata anggota keluarga per KK berjumlah 5,6 orang.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 75,29)

Untuk mencapai indikator kemiskinan desa menurun, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan bantuan ternak ayam kampung kepada 150 KK dengan rincian per jiwa Rp150.000,- Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp40.500.000,- dari dana desa dan Rp4.500.000,- dari PBH.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah pemberian BLT-DD kepada sebanyak 172 KK dengan rincian per jiwa Rp3.600.000,- Untuk kegiatan ini,



pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp619.200.000,- (40%) dari dana desa. Selain itu, ada 73 KK penerima PKH. Dalam dokumen Kementerian Desa, tercatat 318 keluarga penerima bantuan sosial.

Pemerintah desa memberikan PMT untuk ibu hamil kepada 22 orang sebanyak 6 kali. PMT untuk ibu menyusui diberikan kepada 40 orang sebanyak 6 kali. Sementara itu, PMT Balita diberikan kepada 145 orang sebanyak 6 kali. Untuk ini, alokasi anggaran dari desa sebesar Rp54.000.000,-

Tahun 2022, tercatat 2 kasus kematian bayi. Untuk akses air bersih, Desa Oelomin tidak mengalami masalah, namun demikian masih ada 50 rumah tidak layak huni (RTLH).

Keluarga miskin yang ditangani pada 2022 ada 80 KK yang menjadi korban bencana Siklon Seroja (7 KK rusak berat, 8 KK rusak sedang dan 65 KK rusak ringan). Ada 80 korban mendapat bantuan dari Dinas PUPR dengan rincian Rp350.000.000,- untuk rusak besar dengan masing-masing KK menerima Rp50.000.000,- Untuk korban sedang, alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,- yang masing-masing KK mendapat Rp25.000.000,- Untuk rusak ringan, alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000,- dengan masing-masing KK mendapat Rp10.000.000,- Indikator miskin dengan skor 32,28, dengan volume 1.414 jiwa. Untuk indikator kemiskinan ekstrim, Desa Oelomin mendapat skor 46,45, dengan volume 83 jiwa. Indikator warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dengan volume 7 jiwa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 68,18)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-5. Untuk ini, ada 2 SK yang dikeluarkan oleh Desa Oelomin, yaitu (1) SK Kades tentang Forum Perempuan Desa dan (2) SK Kades tentang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam melahirkan kebijakan ini, pemerintah desa bekerjasama dengan Konsorsium Timor Adil Setara (KTAS) Nusa Tenggara Timur.

Untuk mencapai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Perempuan makin menurun, pemerintah desa bekerjasama dengan KTAS NTT membentuk Satgas PPA di tingkat Desa. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satgas PPA, seperti diskusi tematik tentang kekerasan terhadap perempuan, pendampingan dan penanganan kasus, peran dan tugas satgas PPA, pelatihan paralegal, magang paralegal dan penyusunan SOP penanganan kasus. Tahun 2022, satu kasus kekerasan fisik terhadap disabilitas berhasil ditangani desa yang bekerjasama dengan Garamin NTT dan KTAS NTT. Korban mendapat layanan secara baik dan berkeadilan, serta pelaku dihukum penjara 6 bulan. Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama) dan jumlah anak yang melahirkan tahun 2022 tidak ada kasusnya. Pemerintah desa melalui Pokja PKK mengadakan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak untuk remaja di Oelimin. Di Desa Oelomin, keterwakilan perempuan dalam BPD hanya ada 4 orang perempuan dari 9 anggota BPD (44,4%). Di perangkat desa, baru ada 3 perempuan dari 11 perangkat desa (27,2%). Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes minimal 30%, kegiatan yang dilakukan oleh desa atas dukungan KTAS NTT dan Oxfam.

- c. Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 44,78)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-8. Berdasarkan data di situs Kementerian Desa, Desa Oelomin mencapai skor 56,51 dengan volume Rp17.517.234,- untuk indikator ini.

Data SDGs di situs Kementerian Desa, ada 60,83% masyarakat Desa Oelomin petani pemilik lahan, PNS 8,90%, dan guru 4,15%. Untuk pengangguran 0%, kegiatan yang dilakukan mendukung mendapat skor 78,45 dengan volume 167 jiwa. Akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui sosialisasi koperasi simpan pinjam "MONAFEN" untuk UMKM atau kelompok perempuan yang bekerjasama dengan KSP Monafen dan KTAS NTT.

7. Desa Tunfeu

Desa Tunfeu memiliki luas 2,70 km² (2,21%) dari Nekamese. Jarak desa ke ibukota kecamatan sekitar 3 km, sedangkan jarak ke ibukota sekitar 49 km. Kondisi Tunfeu berupa hamparan dengan kemiringan sedang dan ketinggian 380,00 mdpl. Desa Tunfeu terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW dan 12 RT dengan pusat pemerintahan berada di Noesinas. Penduduk Desa Tunfeu berjumlah 1501 jiwa yang terdiri dari 724 laki-laki dan 777 perempuan. Penduduk desa menjadi 437 KK; sebanyak 90 KK laki-laki dan 15 KK perempuan masuk keluarga miskin. Kemudian 15 KK laki-laki dan 5 KK perempuan masuk keluarga sangat miskin (ekstrim). Jumlah penduduk Tunfeu 15,26% dari total penduduk Nekamese dengan rata-rata per KK berjumlah 3,5 orang.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 50,68)

Unuk SDGS Tujuan-1 ini, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberi bantuan sapi untuk keluarga kurang mampu. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp74.766.000,- Penerima manfaat ini adalah 10 KK miskin. Keluarga miskin penerima BLT-DD sebanyak 148 KK dengan alokasi anggaran Rp532.800.000,-(40%) dari dana desa. Selain itu, ada 86 KK penerima PKH dan 30 KK penerima BPNT. Jika dilihat data di Kementerian



Desa, ada 187 keluarga di Desa Tunfeu yang menerima berbagai bantuan sosial pemerintah.

Indikator keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, Posyandu Lansia dan PMT *stunting*, maka untuk ini alokasi anggaran sebesar Rp59.370.000,- digelontorkan pemerintah desa. Untuk Posyandu Lansia dialokasikan anggaran sebesar Rp34.800.000,- dan PMT Rp24.570.000,- Anggaran dari Puskesmas diberikan kepada Posyandu lansia dan kader KB setiap bulannya Rp50.000,- untuk 12 bulan pada 2022. Anggaran ini disediakan untuk honorarium 31 kader Posyandu.

Akses air bersih di Desa Tunfeu tidak mengalami kesulitan, karena semua keluarga memiliki air minum yang baik. Masih ada 2 rumah yang berlantai tanah dan 12 rumah belum permanen serta 2 rumah tidak layak huni (RTLH).

Indikator kemiskinan desa mencapai skor 32,32, dengan volume 999 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim skornya 34,47 dengan volume 192 jiwa. Warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan skor 73,91 dengan volume 34 jiwa. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan dengan volume 1 jiwa. Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai skor 68,18 dengan volume 15 jiwa. Individu miskin menerima pendidikan SD mencapai skor 66,67 dengan volume 2 jiwa. Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100% dengan volume 4 jiwa. Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai skor 75,00 dengan volume 3 jiwa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 53,68)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator untuk mencapai SDGs Tujuan-5 ini. Untuk ini, ada 3 SK yang dikeluarkan oleh Desa Tunfeu, yaitu (1) SK Kepala Desa Tunfeu No. 06/SKP/DTF/1/2017 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) SK Kepala Desa Tunfeu No. 21/SKEP/DTF/VI/2021 tentang Kelompok Perempuan Kasih dan (3) SK Kepala Desa Tunfeu tentang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Membentuk Paralegal dan mengeluarkan SK Paralegal merupakan kegiatan

yang dilakukan Desa Tunfeu guna kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan menurun. Desa mengalokasikan anggaran, menyediakan Posko dan melakukan pendampingan serta pencatatan kasus. Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama) dan anak yang melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR) serta angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/, desa belum memiliki data dan kegiatan yang dilakukan pada 2022. Pendewasaan usia kawin di Tunfeu, rata-rata kawin pada usia 22 tahun.

Jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa di Tunfeu saat ini hanya ada 3 orang perempuan (33,3%) dari 9 anggota. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp40.200.000,- Jumlah perempuan di perangkat desa hanya ada 3 orang perempuan (30%). Jumlah perempuan yang ikut Musdes dan Musrenbangdes di Desa Tunfeu hanya 25 orang (31,25%) dari 80 peserta yang hadir.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 28,02)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-8. Berdasarkan data tahun 2022, PAD Tunfeu Rp12.960.000,- Untuk meningkatkan ini, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah pengadaan sapi 10 ekor yang dibagikan kepada 10 orang, dimana 1 dari 10 penerima manfaatnya adalah perempuan. Untuk ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp74.766.000,- Sesuai kesepakatan, pengembaliannya di tahun ke-2, setelah menerima ternak, dengan nilai Rp5.200.000,-

Dalam pencapaian SDGs di situs Kementerian Desa, Desa Tunfeu mendapat skor 18,83 dengan volume Rp5.836.512,-

Saat ini desa belum memiliki dokumen. Mayoritas penduduk Desa Tunfeu merupakan petani pemilik lahan. Sekitar 194 orang (62,99%) tercatat sebagai petani pemilik lahan, sebagai PNS 4,55%, dan guru 3,57%. Pengangguran terbuka mendapatkan skor 71,86 dengan volume 204 jiwa.

Angkatan kerja baru yang dilatih mendapatkan skor 11,27 dengan volume 23 orang. Akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), beberapa kegiatan yang dilakukan desa ialah sosialisasi Bank BRI terkait KUR. Desa membantu persyaratan administrasi dan surat keterangan usaha. Ada 10 kelompok usaha yang difasilitasi oleh pemerintah desa mendapatkan KUR. Untuk ini, desa mengalokasikan anggaran Rp250.000.000,-

8. Desa Oe'Ekam

Desa Oe'Ekam memiliki luas 20,69 km² (13,86%) dari luas Kecamatan Amanuban Timur. Pusat Kecamatan Amanuban Timur berada di Desa Oe'Ekam, sehingga jarak desa ke kota kecamatan hanya 1 km, sementara jarak ke ibu kota Kabupaten sekitar 57 km. Desa ini terbagi menjadi 10 Dusun, 10 RW dan 23 RT. Penduduk Desa Oe'Ekam berjumlah 3119 jiwa yang terdiri dari 1563 laki-



laki dan 1556 perempuan yang terbagi menjadi 739 KK; terdiri dari 700 KK laki-laki dan 39 KK perempuan. Dari 371 KK yang ada, 332 KK laki-laki dan 39 KK perempuan masuk kategori miskin. Ada 73 KK yang terdiri dari 50 KK laki-laki dan 23 KK perempuan masuk kategori sangat miskin (ekstrim). Yang masuk kategori KK tidak miskin ada 295 KK, yang terdiri 200 KK laki-laki dan 95 KK perempuan. Jumlah lansia laki-laki miskin 31 orang dan perempuan 39 orang. Lansia laki-laki sangat miskin ada 31 orang dan perempuan 39 orang.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 35,21)

Indikator SDGs Tujuan-1 adalah tingkat kemiskinan desa menurun, untuk itu pemerintah desa memberikan bantuan ternak ayam, babi, sapi dan kambing untuk keluarga yang kurang mampu. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp100.000.000,- Penerima manfaat kegiatan ini adalah 50 KK yang tidak mampu. Keluarga miskin yang menerima bantuan sosial, seperti BLT Desa, BST, PKH dan BPNT. Untuk BLT, alokasi anggarannya 40% dari dana desa. Di Oe'Ekam, ada 100 KK sebagai penerima BLT dana desa. Dalam dokumen Kementerian Desa, saat ini tercatat 337 KK penerima berbagai bansos pemerintah di Oe'Ekam.

Penerima PMT *stunting* untuk bayi balita ada 12 orang dan ibu hamil 2 orang. Alokasi anggaran desa hanya untuk PMT *stunting*, sementara Posbindu anggarannya berasal dari Dinas Kesehatan (Puskesmas).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa terkait capaian SDGs Tujuan-1 memperoleh skor 35,21. Hal ini didapat dari indikator tingkat kemiskinan desa dengan skor 16,72 dengan volume 2282 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai skor 53,70 dengan volume 25 jiwa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 96,40)

Di Desa Oe'Ekam saat ini ada SK tentang Paralegal. Keberadaan SK ini membantu pencapaian indikator Perdes atau SK Kades yang responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan adanya paralegal, kasus-kasus KDRT yang terjadi di desa bisa teridentifikasi dan tertangani. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp9.268.000,- untuk pendampingan kasus. Pemerintah desa juga menyediakan posko pengaduan, pendampingan dan pencatatan kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun menjadi 75%.

Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama) dan jumlah anak yang melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age*

specific fertility rate/ASFR), pemerintah desa belum memiliki program dan anggaran khusus terkait hal itu. Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat, saat ini di desa tersedia 3 unit PAUD, 2 Unit TK, 5 Unit SD dan sederajat, 4 Unit SMP dan 2 unit SMA/SMK. Namun dari data di Kementerian Desa, ada 26,35% penduduk Oe'Ekam yang tidak sekolah atau tidak tamat SD, dan sekitar 22,12% yang memiliki ijazah tertinggi SMA sederajat.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa, saat ini dari 5 anggota BPD hanya ada 2 orang perempuan (40%). Di perangkat desa, hanya ada 3 perempuan (27,2%) dari 11 orang. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di forum Musdes dan Musrenbangdes, dari 150 peserta yang diundang hanya ada 25 perempuan yang terlibat (16,6%). Untuk capaian SDGs Tujuan-5, desa ini memperoleh skor 96,40.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 40,16)

Untuk mencapai Tujuan-8, Desa Oe'Ekam belum memiliki datanya. Masyarakat kebanyakan bekerja sebagai petani atau pekebun, sisanya sebagai guru, PNS, TNI, Polri, dan pegawai swasta. Berdasarkan data di Kemendes, ada 60,88% penduduk Desa Oe'Ekam merupakan petani pemilik lahan, sebagai PNS 13,17%, dan guru 12,40%. Untuk mengatasi kondisi pengangguran warga, pemerintah desa menciptakan lapangan kerja dengan membentuk kelompok tani hortikultura, budidaya ikan air tawar, dan tenun ikat. Hortikultura terdiri dari 6 kelompok, ada 6 kelompok budidaya air tawar, dan 4 kelompok tenun ikat. Untuk kegiatan ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk kelompok hortikultura dan budidaya air tawar Rp2.500.000,-/kelompok.

Angkatan kerja baru atau anak-anak baru selesai sekolah mendapat pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan dinas perindustrian, bank, dan lainnya. Pemerintah desa bekerjasama dengan BLK yang dibiayai oleh Keuskupan Agung Kupang melibatkan 20 peserta pelatihan untuk setiap kelompok.

Untuk akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), pemerintah

desa bekerjasama dengan BRI melakukan sosialisasi KUR. Desa membantu kelompok, kelancaran persyaratan administrasi, dan surat keterangan usaha. Di Oe'Ekam, saat ini ada 2 lembaga permodalan formal (bank dan lembaga keuangan mikro) yang bisa diakses pelaku usaha dan UMKM. Selain itu, ada 1 UMKM yang ada di Desa dan 9 pelaku usaha. Apa yang dilakukan Desa Oe'Ekam terkait Tujuan-8 memperoleh skor 40,16.

9. Desa Oesena

Desa Oesena luasnya sekitar 11,91 km² (7,68%) dari luas Kecamatan Amarasi. Kondisi permukaan lahan berupa hamparan dengan kemiringan landai dan ketinggian 335 mdpl. Jarak Oesena ke ibu kota kecamatan sekitar 1 km, sedangkan ke ibu kota kabupaten sekitar 17 km. Desa ini terbagi menjadi 3 Dusun, 6 RW dan 12 RT. Berdasarkan data di situs Kemendes, status desa adalah maju dengan skor 0,7237. Penduduk Desa Oesena saat ini berjumlah 1675 jiwa yang terdiri dari 830 laki-laki dan 845 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 420 KK, dimana 381 KK masuk kategori miskin, 28 KK kategori sangat miskin (ekstrim), dan 15 KK kategori tidak miskin. Dari 1675 jiwa yang ada, maka 188 jiwa adalah penduduk lansia.



a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 7,00)

Untuk tingkat kemiskinan desa menurun, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah memberi bantuan bibit padi untuk keluarga yang kurang mampu dan ternak sapi. Untuk bibit padi, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp142.000.000,- dari bidang pemberdayaan. Untuk bantuan sapi, ada 9 ekor diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan anggaran Rp54.000.000.- Untuk bantuan sapi ada 9 KK yang menerimanya, dan bibit padi diterima oleh 448 KK.

Terkait keluarga miskin penerima bantuan sosial, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah pemberian BLT Desa, BST, PKH, dan BPNT. Untuk BLT, desa mengalokasikan anggaran 40% dari total dana desa dengan penerima manfaat 113 KK. Penerima PKH sebanyak 125 KK dan penerima BPNT 20 KK. Bantuan lain yang diterima masyarakat desa ialah bantuan untuk Lansia sebanyak 20 jiwa, disabilitas sebanyak 21 jiwa, subsidi pupuk ada 12 KK dan subsidi listrik 210 KK.

Warga desa peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (PBI dan non PBI) dan Ketenagakerjaan tercatat 400 dan 5 KK penerima BPJS Non PBI/BPJS Mandiri. Dilihat di situs Kemendes, 311 keluarga saat ini penerima BLT dana desa, PKH, BST, Banpres, Bantuan UMKM, Bantuan Pekerja, Bantuan Pendidikan dan lainnya.

Untuk PMT, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp32.000.000.- Untuk akses air bersih, Desa Oesena tidak mengalami masalah, karena semua KK memiliki air bersih yang baik. Masih ada 2 rumah warga yang tidak layak huni (RTLH). Untuk akses kesehatan, di Desa Oesena saat ini ada 3 Posyandu Balita, 3 Posyandu Lansia, 1 Posyandu Remaja, dan 1 Posbindu. Untuk sarana pendidikan, tersedia 3 unit PAUD, 1 TK, 2 SD Sederajat, dan 1 SMP. Terkait capaian SDGs Tujuan-1, Desa Oesena mendapat skor 7,00 dengan volume 1740 jiwa.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 45,01)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan merupakan capaian Tujuan-5 ini. Untuk itu, Desa Oesena memiliki SK terkait Paralegal. Dengan SK tersebut, paralegal dapat melakukan penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain SK Paralegal, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran operasional untuk paralegal. Pemerintah desa menyediakan posko dan pencatatan kasus. Tahun 2022, tercatat 2 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diidentifikasi. Apa yang dilakukan pemerintah desa bersama paralegal telah membantu pencapaian indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan makin menurun.

Paralegal mendukung pencapaian indikator usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama). Untuk ini, pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui geraja atau rapat-rapat desa. Pendewasaan usia perkawinan turut menyumbang capaian indikator jumlah anak melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR) kian menurun. Tahun 2022, tercatat satu remaja usia 14 tahun yang melahirkan.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa minimal 30% belum tercapai, karena hanya 2 orang perempuan (22,2%) dari 9 anggota BPD. Demikian pula jumlah perempuan di perangkat desa minimal 30%, hanya 1 perempuan (11,1%) dari 9 orang. Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Musdes dan Musrenbangdes, hanya 28 orang perempuan (60,8%) dari 46 peserta yang hadir.

Untuk angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat, pemerintah desa membentuk kelompok pemuda bidang pertanian, peternakan dan UMKM. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan 4 gereja yang membentuk kelompok pemuda. Tahun 2022, tidak tercatat anak yang putus sekolah. Saat ini, di Desa Oesena ada 3 unit PAUD, 1 unit TK, 2 unit SD sederajat, dan 1 unit SMP. Berdasarkan data di Kementerian Desa, pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk desa Oesena ialah SD sederajat. Penduduk yang pendidikan terakhirnya SMA sederajat mencapai 25,22%.

c. Tujuan-8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 22,81)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan indikator capaian Tujuan-8. Tahun 2022, Pendapatan Asli Desa (PAD) Oesena Rp10.000.000,- Untuk pencapaian PAD, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa ialah memberikan pelatihan menjahit bagi 20 orang warga desa dan penyertaan modal di BUMDes.

Pemerintah desa bekerjasama dengan LSM yang ada di desa melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang UMKM. Berdasarkan data Kementerian Desa, mayoritas warga Desa Oesena adalah petani, tetapi juga ada guru serta PNS.

Pengangguran yang tercatat saat ini ada 45 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 25 perempuan. Untuk mengatasi ini, kegiatan yang dilakukan oleh desa adalah Padat Karya Tunai Desa. Kegiatan yang dilakukan adalah pengerasan jalan. Tercatat ada 325 orang warga desa yang terdiri dari 162 laki-laki dan 163 perempuan yang terlibat. Selain itu, ada pekerjaan perbaikan saluran irigasi yang menyerap 185 tenaga kerja.

Akses permodalan formal pelaku usaha dan UMKM (kredit bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), maka pemerintah desa bekerjasama dengan BRI melakukan sosialisasi KUR. Desa membantu pembentukan kelompok, kelancaran persyaratan administrasi, dan surat keterangan usaha. KUR diperuntukan bagi usaha sapi. Di Desa Oesena saat ini ada 1 lembaga permodalan formal yang dapat diakses oleh pelaku usaha dan UMKM. Di desa ini tercatat ada 22 UMKM dan 325 pelaku usaha. Apa yang dilakukan oleh Desa Oesena mencapai Tujuan-8 ini ialah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Untuk ini, desa memperoleh skor 22,81. PDB desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun, skor yang didapatkan 8,26 dengan capaian Rp2.559.914,- Pekerja sektor formal mendapatkan skor 10,65 dengan volume 32 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka mendapat skor 76,79 dengan volume 178 jiwa. Angkatan kerja baru yang dilatih mendapat skor 3,37 dengan volume 6 jiwa.

10. Desa Oelet

Desa Oelet memiliki luas 13,65 km² (9,15%) dari luas kecamatan Amanuban Timur. Pusat pemerintahan ada di dusun Baikpoan. Jarak Desa Oelet ke ibukota kecamatan sekitar 7 km, dan ke ibukota kabupaten sekitar 49 km. Desa ini terbagi menjadi 2 Dusun, 4 RW dan 13 RT. Penduduk Desa Oelet saat ini berjumlah 3570 jiwa yang terdiri dari 1583 laki-laki dan 1987 perempuan serta terbagi menjadi 739 KK, yang terdiri dari 700 KK laki-laki dan 39 KK Perempuan. Dari 371 KK, terdiri 332 KK laki-laki dan 39 KK perempuan masuk kategori miskin. Ada 74 KK yang terdiri dari 30 KK laki-laki dan 44 KK perempuan masuk kategori sangat miskin (ekstrim). Yang masuk kategori tidak miskin ada 391 KK, yang terdiri dari 93 KK laki-laki dan 103 KK perempuan. Jumlah penduduk Desa Oelet 10,28% dari total penduduk Kecamatan Amanuban Timur.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 21,55)

Salah satu indikator dari SDGs Tujuan-1 adalah tingkat kemiskinan desa yang menurun. Kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa ialah mendirikan koperasi yang dapat mendukung pertanian dan peternakan. Dengan adanya koperasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan bibit tanaman dan ternak. Untuk mendukung kegiatan koperasi



tersebut, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp130.777.264,- Untuk mendukung kegiatan pertanian dan perternakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp269.404.810,-

Terkait keluarga miskin penerima bantuan sosial, ada beberapa bantuan sosial yang diterima warga kurang mampu, di antaranya PKH, BPNT dan BLT-DD. Tercatat ada 158 KK sebagai penerima PKH, 163 KK penerima Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), dan 126 KK penerima BLT-DD. Terkait peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (PBI dan nonPBI) dan Ketenagakerjaan, saat ini tercatat 323 warga penerima bantuan KIS/BPJS PBI dan 12 warga penerima BPJS Ketenagakerjaan.

Di dokumen Kementerian Desa, tercatat 308 KK sebagai penerima berbagai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Keluarga miskin yang mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran Rp5.000.000,- yang diperuntukkan bagi guru honorer. Selain itu, juga dialokasikan anggaran sebesar Rp204.473.590,- untuk mendukung kegiatan Posyandu, Lansia, dan penanganan *stunting*.

Untuk sarana kesehatan, saat ini di Desa Oelet ada 3 Posyandu Balita, dan 1 Posdes. Sedangkan untuk sarana pendidikan, tersedia 1 PAUD, 2 unit TK, 2 unit SD Sederajat, 1 Unit SMP dan 1 unit SMA. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan capaian SDGs Tujuan-1 ini memperoleh skor 21,55.



b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 49,79)

Di Desa Oelet ada SK Paralegal. Selain itu, ada SK KPAD. Keberadaan SK ini membantu pencapaian indikator Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan adanya paralegal, kasus-kasus KDRT yang terjadi di desa dapat teridentifikasi dan tertangani. Pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran Rp9.268.000,- untuk pendampingan kasus. Pemerintah desa juga menyediakan posko pengaduan dan pencatatan kasus. Dengan ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun dari 100% menjadi 75%.

Untuk mencapai angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA sederajat, di desa ada 4 unit PAUD, 2 Unit TK, 5 Unit SD dan sederajat, 4 Unit SMP dan 2 unit SMA/SMK. Dari data Kementerian Desa, ada 28,95% penduduk desa yang tidak sekolah atau tidak tamat SD.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa, saat ini dari 5 anggota BPD hanya ada 2 orang perempuan (40%). Di perangkat desa, ada 3 orang perempuan (27,2%) dari 11 orang. Keterlibatan perempuan dalam forum Musdes dan Musrenbangdes, dari 150 peserta hanya 25 orang perempuan yang terlibat (16,6%). Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk capaian SDGs Tujuan-5, Desa Oelet mendapat skor 49,79.

c. Tujuan-8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 25,63)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan salah satu indikator capaian SDGs Tujuan 8 ini. Desa Oelet sendiri belum memiliki data untuk pencapaian ini. Kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani atau pekebun, 6,90% sebagai guru dan 4,90% PNS. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah desa menciptakan lapangan kerja membentuk kelompok tani hortikultura, budidaya ikan air tawar dan kelompok tenun ikat. Untuk Hortikultura terdiri dari 6 kelompok, budidaya air tawar 6 kelompok, tenun ikat 4 kelompok. Pemerintah desa memberikan bantuan dana

untuk kelompok Holtikultura dan kelompok Budidaya Air Tawar sebesar Rp2.500.000,- per kelompok.

Angkatan kerja baru mendapat pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan dinas perindustrian, bank, dan lainnya. Pemerintah desa bekerjasama dengan BLK yang dibiayai Keuskupan Agung Kupang dengan melibatkan 20 orang per kelompok.

Untuk akses permodalan formal bagi pelaku usaha dan UMKM (kredit bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), pemerintah desa bekerjasama dengan BRI melakukan sosialisasi KUR. Desa membantu pembentukan kelompok, kelancaran persyaratan administrasi, dan surat keterangan usaha. Di Desa Oelet, terdapat 2 lembaga permodalan formal (bank dan lembaga keuangan mikro) yang dapat diakses pelaku usaha dan UMKM. Selain itu, ada 1 UMKM dan 9 pelaku usaha.

11. Desa Maubesi

Desa Maubesi memiliki luas 49 km² (39,52%) dari luas Insana Tengah. Jarak desa Maubesi ke ibukota kecamatan sekitar 3 km, sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 18 km. Kondisi permukaan tanah Desa Maubesi ialah berupa hamparan dengan kemiringan sedang dan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Desa Maubesi terbagi menjadi 5 Dusun, 5 RW dan 21 RT dengan pusat pemerintahan desa berada di Maubesi. Penduduk Desa Maubesi berjumlah 3293 jiwa yang terdiri dari 1699 laki-laki dan 1594 perempuan. Penduduk desa terbagi menjadi 805 KK, terdiri dari 730 KK laki-laki dan 75 KK perempuan. Jumlah penduduk Maubesi 32,66% dari total penduduk Kecamatan Insana Tengah.

a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (---)

Untuk mencapai SDGs Tujuan-1, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberikan bantuan ternak sapi untuk keluarga yang kurang mampu. Penerima manfaat program ini tercatat 16 KK yang miskin, dimana setiap KK mendapatkan bantuan 2 ekor sapi, sehingga total



sapi yang diberikan mencapai 32 ekor. Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah desa telah memberikan bantuan sosial kepada warga desa. Bantuan yang diterima tersebut melalui berbagai program pemerintah, seperti BST, PKH, BPNT, dan sebagainya. Saat ini, tercatat 570 KK, yang terdiri dari 214 KK penerima PKH, 196 KK penerima BPNT dan 160 KK Penerima BST. Di samping itu, ada 160 orang lansia, 9 orang disabilitas dan 13 orang ODGJ yang menerima bantuan. Pemerintah desa mencatat ada 352 orang penerima bantuan subsidi pupuk.

Pemerintah desa memberi bantuan sembako bagi lansia berjumlah 160 orang dengan total anggaran Rp16.216.200,- Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran Rp25.000.000,- untuk pemberian PMT bagi bayi dan balita dengan penerima manfaat 126 orang. Untuk keluarga miskin korban bencana yang ditangani pemerintah desa, tidak ada program dan anggaran dari desa Maubesi. Namun pemerintah desa mencatat ada 805 KK yang menjadi korban bencana (bencana alam dan bencana nonalam).

b. Tujuan-5 (Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (---)

Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan merupakan indikator capaian SDGs Tujuan-5 ini. Untuk mendukung itu, pemerintah desa mengeluarkan SK terkait Paralegal. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran transportasi sebesar Rp1.000.000,- untuk kegiatan pendampingan kasus. Untuk menjamin perempuan mendapatkan layanan, informasi, dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, pemerintah desa mendorong dilaksanakannya Posyandu Remaja. Kegiatannya adalah memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi melalui persiapan pernikahan dan pemasangan baliho terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah desa, gereja, Yabiku, kepolisian dan DP3A Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Semua kasus yang ditangani paralegal, gereja, DP3AP dan kepolisian dapat diselesaikan dengan tuntas.

Untuk usia kawin perempuan di atas 19 tahun (pendewasaan usia kawin pertama) dan jumlah anak yang melahirkan pada usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR), pemerintah desa melalui gereja bekerjasama dengan Yabiku melakukan sosialisasi terkait pendewasaan perkawinan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di setiap SMP dan SMA. Dampak sosialisasi ini adalah rata-rata perkawinan dilakukan di atas usia 21 tahun.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa minimal 30%, saat ini ada 5 orang perempuan dari 9 orang anggota BPD. Untuk jumlah perempuan di perangkat desa, saat ini dari 13 perangkat desa Maubesi, hanya ada 4 orang perempuan (30,7%). Jumlah perempuan yang menghadiri Musdes dan Musrenbangdes, dari 97 orang yang diundang hanya 52 orang perempuan yang hadir (53,6%).

c. Tujuan-8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (...)

Untuk SDGs Tujuan-8 ini, pemerintah desa tidak memiliki informasi dan

kegiatan yang dilakukan. Akses permodalan bagi pelaku UMKM (Kredit Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, Dukungan Pemerintah Desa), kegiatan yang dilakukan bank BRI tentang permodalan bagi pelaku usaha. Di Desa Maubesi, selain BRI, ada Kopdit Swasti Sari yang bisa diakses oleh pelaku usaha.

12. Desa Oebelo

Desa Obelo memiliki luas 9,76 km² (10%) dari Kupang Tengah. Pusat pemerintahan berada di Oebelo dengan jarak ke Ibukota kecamatan hanya 7 km, dan jarak ke ibukota Kabupaten sekitar 18 km. Desa ini terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW dan 22 RT. Penduduk Desa Oebelo saat ini berjumlah 3570 jiwa yang terdiri dari 1583 laki-laki dan 1987 perempuan. Terbagi menjadi 739 KK, yang terdiri dari 700 KK laki-laki dan 39 KK perempuan. Dari 371 KK, ada 332 KK laki-laki dan 39 KK perempuan masuk kategori miskin. Dari 74 KK yang terdiri dari 30 KK laki-laki dan 44 KK perempuan masuk kategori sangat miskin (ekstrim). Yang masuk kategori KK tidak miskin ada 391 KK, yang terdiri dari 93 KK laki-laki dan 103 KK perempuan.



a. Tujuan-1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun) (skor: 7,90)

Untuk indikator capaian SDGs Tujuan-1, pemerintah desa memberikan bantuan ternak ayam, babi, sapi dan kambing untuk keluarga yang kurang mampu. Untuk kegiatan ini, Pemdes mengalokasikan anggaran Rp10.000.000,- per kelompok, dan penerima manfaatnya ada 150 KK.

Untuk keluarga miskin penerima bantuan sosial, berbagai bantuan sosial yang diterima warga yang kurang mampu adalah BLT Desa, BST, PKH dan BPNT. Untuk BLT dana desa, alokasi anggarannya adalah 40% dari dana desa. Di dokumen Kementerian Desa, tercatat 337 KK penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Keluarga miskin yang mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, kegiatan yang dilakukan adalah melalui Posyandu lansia (posbindu), PMT *stunting*, bantuan air dari pemerintah dan LSM. Penerima PMT *stunting* ialah 12 orang balita dan 2 orang ibu hamil.

b. Tujuan-5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) (skor: 42,86)

Di Desa Oebelo saat ini ada SK tentang Paralegal. Selain itu, ada SK tentang KPAD. Keberadaan SK ini membantu capaian Perdes atau SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. SK Paralegal mendukung penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, karena kasus yang terjadi di desa dapat teridentifikasi dan tertangani lebih baik. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran Rp9.268.000,- untuk pendampingan kasus. Selain mengalokasikan anggaran, pemerintah desa menyediakan posko pengaduan, pendampingan dan pencatatan kasus. Dengan adanya paralegal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sedikit menurun dari 100% menjadi 75%.

Untuk partisipasi sekolah SMA/SMK/MA sederajat, saat ini di desa terdapat 4 unit PAUD, 2 unit TK, 5 unit SD dan sederajat, 4 unit SMP dan 2 unit SMA/SMK.

Jumlah perempuan yang terlibat di Badan Permusyawaratan Desa minimal

30%, dari 5 anggota BPD hanya ada 2 orang perempuan (40%). Di perangkat desa, hanya ada 3 orang perempuan (27,2%) dari 11 orang. Dalam pengambilan keputusan di forum Musdes dan Musrenbangdes, hanya ada 25 orang perempuan dari 150 peserta yang hadir.

- c. **Tujuan-8** (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) (skor: 25,28)

Pendapatan Asli Desa rata-rata di atas Rp30 juta per tahun merupakan salah satu indikator Tujuan-8. Berdasarkan data tahun 2022, tidak ada PAD yang diperoleh Desa Oebelo. Di dokumen Kementerian Desa, Desa Oebelo mencapai skor 3,18 dengan volume Rp987.261,-

Dalam dokumen SDGs, Desa Oebelo mencapai skor 21,79 dengan volume 10 jiwa. Untuk tingkat pengangguran, pemerintah desa menciptakan lapangan kerja dengan membentuk kelompok tani hortikultura, budidaya ikan air tawar, dan membentuk kelompok tenun ikat. Untuk Hortikultura terdiri dari 6 kelompok, budidaya air tawar 6 kelompok, sedangkan tenun ikat 4 kelompok. Untuk ini, pemerintah desa memberi bantuan yang dialokasikan dari dana desa untuk kelompok Hortikultura dan kelompok Budidaya Air Tawar sebesar Rp2.500.000,- per kelompok.

Untuk angkatan kerja baru, pelatihan-pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan dinas perindustrian, bank, dan lainnya. Pemerintah desa bekerjasama dengan BLK yang dibiayai Keuskupan Agung Kupang yang melibatkan 20 orang per kelompok.

III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengisian *tools* SDGs di 21 desa di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini secara umum cukup lengkap. Data-data yang disajikan dari setiap desa cukup memadai meskipun di sana sini masih ada desa yang tidak tersedia data SDGsnya. Pengisian *tools* ini seharusnya dikerjakan secara teliti, akurat dan berdisiplin dengan ketersediaan data-data lapangan di masing-masing desa, sehingga dokumen yang dihasilkan akan banyak membantu setiap pemerintah desa untuk melaporkan capaian-capaian utamanya di Tujuan-1, 5, dan 8.

Secara umum dari data yang ada menggambarkan bahwa Tujuan-1, 5, dan 8 masih jauh dari capaian optimal. Belum begitu jelas menggambarkan dan terpilah bagaimana kondisi kemiskinan perempuan di desa. Faktor-faktor apa yang memicu kemiskinan tersebut. Tentu gambaran kualitatif dan kuantitatif akan membantu publik jika tersajikan dengan lengkap. Bagaimana kaitan antara Tujuan-1 dengan Tujuan-5 dan Tujuan-8 kurang terjabarkan secara kualitatif dan kuantitatif. Juga perlu dideskripsikan interseksi Tujuan-1, 5, dan 8 dengan Tujuan SDGs lainnya, sehingga tercermin besarnya capaian dan isu-isu yang muncul.

Ketiga Tujuan SDGs tersebut berguna untuk memotret sejauh mana desa konsen terhadap pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Hal ini sesuai dengan amanat UU Desa No.16 Tahun 2014 yang mensyaratkan keterlibatan

penuh perempuan desa dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan desa yang minim akan melahirkan ketimpangan gender dalam pembangunan dan melanggar hak konstitusional warga desa serta pelanggaran hak asasi manusia perempuan desa. Pemerintah desa wajib hukumnya melibatkan perempuan desa dalam pembangunan secara setara, tanpa diskriminasi, dan adil gender.

Rekomendasi yang perlu diusulkan kepada setiap pemerintah di 21 desa tersebut ialah perlunya perbaikan sistem informasi dan dokumentasi desa yang mampu mencerminkan basis data yang terpilah, *update*, dan *real time*. Dukungan sistem teknologi informasi sangat diperlukan untuk mempermudah pengelolaan data dan akses informasi publik secara akurat, *update*, dan *real time*.

Diperlukan dukungan anggaran pemerintah yang memadai dalam mencapai Tujuan-1, 5, dan 8 secara optimal. Padahal dalam kondisi APB Desa yang tidak mencukupi serta terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa yang tersedia, kerap muncul masalah baru bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran yang minim. Dalam konteks ini, diperlukan kecakapan dan keluwesan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha dan jaringan bisnis desa tanpa harus melanggar aturan hukum yang ada. Kebijakan, program dan anggaran desa dalam pembangunan merupakan instrumen tritunggal yang penting dalam tercapainya SDGs Tujuan-1, 5, dan 8.

Namun demikian, upaya 21 desa tersebut dalam mengungkapkan kondisi implementasi SDGs masing-masing patut mendapat apresiasi.

Referensi

1. A.H. Iskandar. 2020, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Jakarta: Buku Obor.
2. Bappenas. 2012, *Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender (IKKG) & Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPG): Kajian Awal*, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia.
3. Kemen PPPA RI. 2020, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Retno Kusumawiranti. 2021, *Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa*, Program Studi Administrasi Publik Universitas Widya Mataram, POPULIKA, Vol. 9, No. 1.
5. <https://sdgs.bappenas.go.id/>

